KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal
Perkebunan
·Perkelanjutan · Unggul · Nuraga

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PELINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN AMBON



#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini memuat tentang 1) Bab I Pendahuluan; 2) Bab II Perencanaan Kinerja 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja; 4) Bab IV Penutup.

Kami menyadari bahwa Laporan ini Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu kami mengharapkan masukan dan koreksi dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan kedepan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Laporan ini.

Ambon, 05 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BBPPTP Ambon,

Balai Sertifikasi Elektronik

Dr. Kardiyono, STP., M.Si
NIP 197003121998031001

IKHTISAR

Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan subsektor perkebunan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Peran tersebut dijalankan melalui penyediaan layanan perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan yang andal, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan produktivitas, mutu hasil, serta daya saing komoditas perkebunan.

Pada Tahun Anggaran 2025, BBPPTP Ambon melaksanakan Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian visi Kementerian Pertanian “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia” dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta ekspor komoditas perkebunan. Program tersebut diimplementasikan melalui lima kegiatan utama, yaitu pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar, pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah, penguatan perbenihan tanaman perkebunan, penguatan pelindungan tanaman perkebunan, serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Wilayah kerja BBPPTP Ambon memiliki potensi strategis dengan komoditas unggulan seperti pala, kelapa, cengkeh, kakao, dan jambu mete yang berperan penting sebagai sumber pendapatan masyarakat dan devisa negara. Dukungan sumber daya manusia fungsional, laboratorium pengujian, serta keanekaragaman hayati menjadi modal utama dalam pengembangan perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan berbasis spesifik lokasi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, BBPPTP Ambon menetapkan sasaran strategis berupa terjaminnya mutu benih tanaman perkebunan, terwujudnya layanan pelindungan tanaman perkebunan, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator kinerja utama pada sasaran layanan pelindungan tanaman perkebunan telah tercapai sesuai target, dengan tingkat layanan mencapai 100% pada seluruh komoditas yang menjadi lingkup pelayanan. Pada aspek perbenihan, kegiatan evaluasi sumber benih, nursery, dan pengawasan peredaran benih telah mendukung peningkatan ketersediaan benih

bermutu dan bersertifikat, meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis berupa gagal panen akibat kondisi iklim ekstrem.

Meskipun capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang positif, dalam pelaksanaannya Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon masih menghadapi sejumlah kendala dan permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis, antara lain:

1. **Faktor Iklim dan Lingkungan**
   Perubahan pola curah hujan dan kejadian iklim ekstrem berdampak pada produksi sumber benih serta meningkatkan risiko serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Kondisi ini berpotensi menurunkan produktivitas kebun sumber benih dan mengganggu jadwal sertifikasi.
2. **Keterbatasan Sarana dan Prasarana**
   Beberapa fasilitas laboratorium, peralatan pengujian mutu benih, serta sarana pendukung lapangan memerlukan pembaruan dan kalibrasi berkala untuk menjaga akurasi hasil pengujian dan efektivitas pengawasan.
3. **Sebaran Wilayah Kerja yang Luas**
   Wilayah binaan yang meliputi kawasan kepulauan di Indonesia bagian timur menyebabkan tantangan dalam hal aksesibilitas, distribusi benih, pengawasan peredaran benih, serta respon cepat terhadap laporan serangan OPT.
4. **Kapasitas dan Distribusi SDM Fungsional**
   Ketersediaan tenaga fungsional pengawas benih tanaman dan pengendali OPT masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah layanan, sehingga intensitas pembinaan dan pengawasan belum optimal.
5. **Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha**
   Masih terdapat pelaku usaha perbenihan yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi ketentuan sertifikasi dan peredaran benih, sehingga memerlukan penguatan sosialisasi dan pembinaan berkelanjutan.
6. **Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah**
   Sinkronisasi program pusat dan daerah dalam pengembangan kawasan perkebunan serta sistem pelaporan teknis masih memerlukan peningkatan agar pelaksanaan kegiatan lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

Berbagai kendala tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan strategi dan rencana

kerja tahun berikutnya. Oleh karena itu, BBPPTP Ambon terus melakukan penguatan manajemen risiko, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sarana laboratorium, serta optimalisasi koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait guna memastikan keberlanjutan layanan perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, BBPPTP Ambon pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp58,55 miliar dengan realisasi sebesar Rp56,53 miliar atau 96,56 persen, yang mencerminkan tingkat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang sangat baik. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga menunjukkan kinerja positif yang tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,18 pada skala Likert (1–4).

Secara keseluruhan, kinerja BBPPTP Ambon Tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan mutu benih, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, serta penguatan tata kelola pelayanan publik di subsektor perkebunan. Ke depan, BBPPTP Ambon akan terus memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta mendorong penerapan teknologi perbenihan dan pelindungan tanaman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ii

IKHTISAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BBPPTP Ambon 2

C. Aspek Strategis Organisasi 5

1. Potensi Pembangunan Perkebunan 5

2. Tantangan Pembangunan Perkebunan 6

3. Aspek Sumber Daya Manusia 7

4. Permasalahan Strategis 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

A. Rencana Strategis 10

1. Visi 10

2. Misi 12

3. Tujuan 12

4. Arah Kebijakan 13

5. Program 15

6. Strategi 15

B. Kegiatan BBPPTP Ambon Tahun 2025 16

C. Rencana Kerja Pemerintah 2025 16

D. Perjanjian Kinerja 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

A. Capaian Kinerja BBPPTP Ambon 19

1. Sasaran Kegiatan terwujudnya layanan Perbenihan 22

2. Sasaran Kegiatan terwujudnya Layanan Pelindungan 26

B. Realisasi Anggaran berdasarkan KRO/RO 48
C. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya 51
D. Capaian Kinerja Lainnya 53
1. Nurseri 53
2. Capaian Kinerja Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan 61
3. Capaian Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Peremajaan Tanaman Kelapa. 67
4. Capaian Akselerasi Hilirisasi Komoditas Tebu Kabupaten Malang 67
BAB IV PENUTUP 70
LAMPIRAN 71
Lampiran I. Perjanjian Kinerja 71
Lampiran II. Indikator Kinerja Utama 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 SDM BBPPTP Ambon 2025 7
Tabel 2 Pagu Anggaran 2025 16
Tabel 3 Perjanjian Kinerja 2025 17
Tabel 4 Capaian Kinerja BBPPTP Ambon Tahun 2025 20
Tabel 5 Data Peredaran Benih 24
Tabel 6 Rekapan Pengujian Mutu APH Januari - Desember 2025 35
Tabel 7 Hasil Uji Sterilisasi Autoclave dengan menggunakan sterikon plus Bioindikator 37
Tabel 8 Uji Sterilitas Menggunakan Cawan Petri 38
Tabel 9 Realisasi Anggaran 48
Tabel 10 Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan di wilayah kerja BBPPTP Ambon 50
Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025 52
Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 54
Tabel 13 Daftar penyaluran sisa benih TA 2023: 54
Tabel 13 Daftar penyaluran sisa benih TA 2023: 55
Tabel 14 Daftar penyaluran benih sisa TA 2023 55
Tabel 15 Daftar penyaluran benih sisa TA 2024: 57
Tabel 16 Daftar penyaluran benih sisa TA 2024: 58
Tabel 17 Rincian Kegiatan Pengembangan Kawasan Pala, kakao 63
Tabel 18 Realisasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan 66
Tabel 19 Status Realisasi per Kategori CPCL Tebu Kab. Malang 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BBPPTP Ambon 3
Gambar 2 Kegiatan Uji APH 35
Gambar 3 Uji Sterilisasi Autoclave dengan Menggunakan Sterikon Plus Bioindikator 38
Gambar 4 Uji Sterilisasi Laminar Air Flow (LAF) dan Ruangan Pengujian Mutu APH dengan Cawan Petri. 39
Gambar 5 Perbanyakan Larva Oryctes sp 40
Gambar 6 Melanjutkan Pengujian Aflatoksin secara rutin 45
Gambar 7 Salur bantuan kegiatan pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan..... 65
Gambar 8 Salur bantuan kegiatan pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan..... 65
Gambar 9 Monitoring bantuan dan penyaluran benih tebu..... 68

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BBPPTP Ambon sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan subsektor perkebunan melalui penyediaan layanan teknis perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan yang andal dan berkelanjutan. Pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPTP Ambon diarahkan untuk menjamin ketersediaan benih tanaman perkebunan bermutu, meningkatkan efektivitas pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), serta memperkuat tata kelola kelembagaan dan pelayanan publik di bidang perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan.

Tahun Anggaran 2025, BBPPTP Ambon melaksanakan Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, yang merupakan bagian dari upaya mendukung agenda pembangunan nasional di bidang pertanian dan perkebunan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas input produksi perkebunan dan penguatan sistem pelindungan tanaman sebagai fondasi peningkatan produktivitas, mutu hasil, dan daya saing komoditas perkebunan.

Sebagai implementasi program tersebut, BBPPTP Ambon melaksanakan sejumlah kegiatan prioritas yang meliputi pengembangan kawasan tanaman tahunan dan tanaman penyegar, pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah, penguatan sistem perbenihan tanaman perkebunan, serta penguatan pelindungan tanaman perkebunan. Selain itu, dilaksanakan pula kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil.

Pelaksanaan kegiatan penguatan perbenihan tanaman perkebunan diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu benih melalui

pengawasan dan pengujian mutu benih secara berkelanjutan, sehingga mampu menjamin ketersediaan benih bermutu bagi pelaku usaha perkebunan. Sementara itu, kegiatan penguatan pelindungan tanaman perkebunan difokuskan pada penerapan dan diseminasi teknologi pelindungan tanaman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menekan risiko kehilangan hasil akibat serangan OPT serta mendukung ketahanan sistem produksi perkebunan.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, output yang diharapkan meliputi terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan sesuai standar, meningkatnya penerapan teknologi pelindungan tanaman perkebunan di tingkat lapangan, serta terselenggaranya pelayanan organisasi yang berkualitas. Secara outcome, pelaksanaan program ini diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan mutu komoditas perkebunan, peningkatan daya saing industri perkebunan, serta penguatan tata kelola pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta Realiasai Anggaran Tahun 2025.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BBPPTP Ambon

BBPPTP Ambon sebagai salah satu UPT dari Direktorat Jenderal Perkebunan, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BBPPTP Ambon

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Kepala BBPPTP Ambon dibantu oleh Kepala Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan kedudukan, tugas dan fungsi BBPPTP Ambon adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

   Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon yang selanjutnya disebut BBPPTP Ambob merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

2. Tugas

   BBPPTP Ambon mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Perbenihan dan Pelindungan tanaman perkebunan.

3. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas di atas BBPPTP Ambon, menyelenggarakan fungsi antara lain:

   a. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan

pelaporan;

b. Pelaksanaan penyiapan kebun perbanyakan dan penyediaan benih;

c. Pelaksanaan pengujian mutu dan fasilitasi sertifikasi benih;

d. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengujian mutu benih;

e. Pelaksanaan pengawasan peredaran benih;

f. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi klon/varietas tanaman perkebunan;

g. Pemberian rekomendasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

h. Pelaksanaan pengembangan kawasan organik;

i. Pelaksanaan pengelolaan hama terpadu;

j. Pelaksanaan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim;

k. Pelaksanaan penyusunan dan penguatan metode pengamatan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

l. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;

m. Pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;

n. Pelaksanaan eksplorasi, perbanyakan, pengujian kualitas, dan penyebaran agens pengendali hayati;

o. Pelaksanaan pengujian dan analisa mutu dan residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;

p. Pelaksanaan pengelolaan layanan data dan informasi perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan;

q. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu

dan manajemen laboratorium perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan;

r. Penguatan jejaring kerja sama laboratorium perbenihan dan pelindungan tanaman perkebunan;

s. Pelaksanaan pencegahan kebakaran di lahan perkebunan; dan

t. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPPTP.

C. Aspek Strategis Organisasi

1. Potensi Pembangunan Perkebunan

Potensi pembangunan perkebunan wilayah kerja BBPPTP Ambon yang terkosentrasi pada wilayah timur Indonesia sangat potensial dan prospektif untuk dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan industri dalam negeri maupun luar negeri (eksport). Komoditas pala, kelapa, cengkeh, kakao, mente dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai agroekosistem. Ditinjau dari aspek ekonomi komoditas tersebut telah menjadi sumber pendapatan dan ekonomi serta devisa. Selanjutnya kementerian telah menetapkan sebagai komoditas strategis dan prioritas untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saing melalui program hilirisasi . Dukungan lembaga BBPPTP Ambon memiliki sumber daya dan sarana yang cukup memadai dalam upaya meningkatkan potensi sumber daya alam yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Laboratorium Uji yang tersedia pada BBPPTP Ambon (Mikologi, Entomologi, LAP, Biomolekuler, Benih) yang dapat mendukung kegiatan pengawasan mutu benih dan Pelindungan tanaman perkebunan ditambah 22 UPPT.

Potensi Sumber Daya Alam Indonesia dikenal dengan keanekaragaman hayati termasuk didalamnya musuh alami (parasit, predator, patogen, maupun pestisida nabati) yang sangat bermanfaat bagi pengendalian OPT perkebunan. Kondisi ini memungkinkan untuk mencari dan mengembangkan varietas unggul spesifik lokasi, pengembangan teknologi spesifik lokasi, pemanfaatan parasit, predator,

patogen, maupun pestisida nabati untuk pengendalian OPT. Tersedianya berbagai rakitan teknologi perbenihan dan Pelindungan tanaman perkebunan dari Balai/Puslit dan Perguruan Tinggi yang dapat diuji terap dan dikembangkan sesuai kondisi spesifik lokasi diwilayah kerja BBPPTP Ambon. Plasma nutfah yang dapat dikembangkan sebagai bahan rekayasa genetika. Partisipasi masyarakat masih antusias dalam menanam tanaman perkebunan.

2. Tantangan Pembangunan Perkebunan

a. Kondisi Geografis

1) Kondisi geografis wilayah yang terbuka menyebabkan kemungkinan keluar-masuknya plasma nutfah dan benih sulit untuk dikendalikan.

2) Keterbatasan ketersediaan benih serta jauhnya lokasi sumber benih dari wilayah pengembangan perkebunan mendorong penggunaan benih yang tidak unggul dan tidak bersertifikat.

3) Sebagian besar areal perkebunan berada pada kawasan dengan topografi yang ekstrem, sehingga menyulitkan pengelolaan dan pengembangan usaha perkebunan.

4) Belum tersedianya peta pengembangan perkebunan pada tingkat regional sebagai acuan perencanaan dan pengembangan wilayah.

b. Kondisi Iklim

Kondisi iklim yang sangat fluktuatif berdampak signifikan terhadap perkembangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) serta mempengaruhi ketersediaan dan kualitas benih perkebunan.

c. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani

1) Kelembagaan petani yang belum berfungsi secara optimal serta kualitas SDM petani yang masih rendah menyebabkan

lambatnya proses transfer dan penerapan teknologi, serta peningkatan mutu produk perkebunan.

2) Kelembagaan petani belum mampu meningkatkan daya tawar petani dalam pemasaran produk perkebunan.

3) Belum berkembangnya lembaga usaha di bidang perbenihan perkebunan yang mampu memenuhi kebutuhan benih unggul dan bersertifikat secara berkelanjutan.

d. Koordinasi Lintas Sektoral dan Daerah

Koordinasi lintas sektor dan lintas daerah masih perlu ditingkatkan guna memenuhi persyaratan perdagangan, khususnya dalam pemenuhan standar dan ketentuan pasar internasional.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada BBPPTP Ambon Tahun 2025 terdiri dari petugas fungsional PBT, POPT, PMHP, dan fungsional umum yang dapat diberdayakan.

Tabel 1 SDM BBPPTP Ambon 2025

Aspek SDM	Kategori	Jumlah (Orang)
Status Kepegawaian	PNS	56
	CPNS	15
	PPPK	30
	Total	**101**
Tingkat Pendidikan	S2	4
	S1	44
	D4	4
	D3	11
	SMA	38
	Total	**101**
Jenis Kelamin	Laki-laki	57

	Perempuan	44
	Total	**101**
Jenis Jabatan	Struktural	2
	JFT	45
	JFU	54
	Total	**101**

4. Permasalahan Strategis

Meskipun wilayah kerja BBPPTP Ambon memiliki potensi strategis yang besar dalam pengembangan perkebunan, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terintegrasi. Permasalahan tersebut mencakup aspek teknis, kelembagaan, sumber daya manusia, serta lingkungan strategis.

Dari aspek perbenihan tanaman perkebunan, tantangan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi benih bermutu sesuai standar, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan standar mutu benih masih bervariasi, sehingga berpotensi menurunkan kualitas input produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.

Pada aspek pelindungan tanaman perkebunan, masih tingginya risiko serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) menjadi tantangan serius, terutama pada komoditas strategis seperti pala, kelapa, cengkeh, kakao, dan jambu mete. Perubahan iklim dan dinamika lingkungan turut meningkatkan intensitas dan sebaran OPT, sementara penerapan teknologi pelindungan tanaman yang ramah lingkungan dan spesifik lokasi belum sepenuhnya diadopsi secara luas oleh pelaku usaha perkebunan.

Dari sisi kelembagaan dan sumber daya manusia, keterbatasan jumlah dan sebaran tenaga fungsional teknis, khususnya PBT dan

POPT, masih menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah kerja yang luas dan berciri kepulauan. Selain itu, kapasitas sarana dan prasarana pendukung, termasuk pemeliharaan dan modernisasi laboratorium, memerlukan penguatan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi pengujian dan standar mutu yang terus berkembang.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya sinergi dan koordinasi lintas sektor serta lintas pemangku kepentingan, baik antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun pelaku usaha. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan hasil inovasi teknologi dan plasma nutfah dalam mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing perkebunan di wilayah kerja BBPPTP Ambon.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden tahun 2025-2029 adalah: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" Visi ini memiliki makna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian Negara, berkontribusi dalam mewujudkan Visi Presiden tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yang selaras dengan Visi Presiden adalah: "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" Secara umum, Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini bermakna bahwa pembangunan pertanian dilanjutkan dengan serangkaian upaya strategis dalam mewujudkan pertanian yang maju sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh Rakyat Indonesia, sehingga dapat mewujudkan Visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Secara detail, makna Visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertanian

Berdasarkan Bab I, Pasal 1, angka 2 UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam

hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

b. Pertanian Maju

Pertanian maju bermakna bahwa pertanian Indonesia akan mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh rantai proses utama pertanian, meliputi penyiapan prasarana dan sarana pertanian, budidaya pertanian, pasca panen komoditas pertanian, pengolahan komoditas pertanian, serta pemasaran komoditas pertanian.

c. Pertanian Berkelanjutan

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 Bab I, Pasal 1, angka 1 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktik pertanian berkelanjutan, sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya. Selain itu, pelaksanaan sistem budidaya pertanian berkelanjutan sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi sirkular pada pembangunan nasional, dimana peran sektor pertanian adalah melalui penerapan pertanian berkelanjutan

d. Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia

Pertanian yang Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia bermakna bahwa pembangunan pertanian juga harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, dimana melalui pembangunan pertanian tersebut, manfaat yang didapat rakyat dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian.

2) Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

3) Komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat.

4) Kesehatan rakyat (one health) dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan serta Kebutuhan Ekspor Komoditas Perkebunan dalam Memperkuat Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”.

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan.

3. Tujuan

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu produk perkebunan yang berdaya saing tinggi dan guna mendukung visi dan misi pembangunan tersebut diatas maka tujuan penyelenggaraan BBPPTP Ambon sebagai berikut :

1) Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul.

2) Meningkatkan uji observasi, uji manfaat dan uji kelayakan benih dalam rangka pelepasan dan penarikan varietas.

3) Mengembangkan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee test*).

4) Meningkatkan ketersediaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan dan musuh alaminya.

5) Meningkatkan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT dan non OPT serta faktor yang mempengaruhi.

6) Mengembangkan teknik dan metode s*urveillance*, pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan.

7) Mengembangkan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan serta PHT.

8) Meningkatkan uji pemanfaatan pestisida.

9) Meningkatkan pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan Pelindungan tanaman perkebunan.

10) Terwujudnya sistem manajemen informasi perbenihan dan Pelindungan tanaman perkebunan.

11) Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan Pelindungan tanaman perkebunan.

12) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.

13) Meningkatkan pelayanan organisasi

4. Arah Kebijakan

Untuk melaksanakan visi, misi dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Umum BBPPTP Ambon adalah: “Memperkuat SDM dan fasilitas laboratorium perbenihan dan Pelindungan tanaman perkebunan serta fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang

perbenihan dan Pelindungan tanaman perkebunan". Kebijaksanaan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu :

1) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan. Dimaksudkan untuk menjadikan SDM yang profesional sehingga mampu melaksanakan pelestarian dan perkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan petugas serta pendampingan bagi petani.

2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan. Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengembangan perbenihan dan Pelindungan tanaman melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar.

3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, sehingga pelaksanaan pelestarian dan perkayaan sumberdaya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut ditempuh upaya sebagai berikut :

   - Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu.
   - Meningkatkan upaya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT.
   - Membantu upaya meningkatkan pengertian dan kesadaran untuk penerapan pengembangan PHT ramah lingkungan bagi petani.

4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi.Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan Pelindungan tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kemampuan SDM dibidang pengelolaan sistem informasi.
- Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan Pelindungan.

5. Program

Program Utama BBPPTP Ambon mengacu kepada program Ditjen Perkebunan, yaitu Program nilai tambah dan daya saing

6. Strategi

Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah :

1) Meningkatkan kualitas SDM Balai antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding serta rekruitmen tenaga fungsional sesuai kebutuhan.

2) Melengkapi sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan media audio visual.

3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT.

4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan.

5) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan.

6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan Pelindungan.

B. Kegiatan BBPPTP Ambon Tahun 2025

Kegiatan BBPPTP Ambon sebagai penjabaran dari program BBPPTP Ambon mempunyai 5 (Lima) kegiatan, yaitu Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah, Penguatan Perlindungan Perkebunan, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan, serta Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan.

C. Rencana Kerja Pemerintah 2025

1. Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan perbenihan dan Pelindungan tanaman perkebunan adalah :

a. Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi Pelindungan.
b. Meningkatnya kualitas layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan.
c. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

2. Alokasi Anggaran berdasarkan KRO/RO

Anggaran BBPPTP Ambon Tahun 2025 mendapat alokasi Anggaran Tambahan pagu semula 13.194.986.000,- menjadi sebesar Rp. 58.548.534.000,-

Tabel 2 Pagu Anggaran 2025

No.	Kode	Nama Kegiatan	Pagu
1	1777	Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar	1.371.780.000
2	1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	1.511.174.000
3	1780	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	8.452.734.000
4	5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	45.338.000.000
5	5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	1.874.846.000

D. Perjanjian Kinerja

Tabel 3 Perjanjian Kinerja 2025

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1.	Terjaminnya mutu benih tanaman perkebunan	1-1	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih pala yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon	80%
		1-2	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih cengkeh yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon	80%
		1-3	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kakao yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon	75%
		1-4	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon	80%
		1-5	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih sagu yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon	75%
2.	Terwujudnya layanan pelindungan tanaman perkebunan	2-1	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa sawit di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%
		2-2	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%
		2-3	Persentase layanan pelindungan komoditas sagu di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%
		2-4	Persentase layanan pelindungan komoditas lada di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%
		2-5	Persentase layanan pelindungan komoditas pala di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%
		2-6	Persentase layanan pelindungan komoditas cengkeh di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%
		2-7	Persentase layanan pelindungan komoditas vanili di wilayah kerja Balai	100%

			Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	
		2-8	Persentase layanan pelindungan komoditas kopi di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%
		2-9	Persentase layanan pelindungan komoditas kakao di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%
		2-11	Persentase layanan pelindungan tanaman perkebunan di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%
3	Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas	3-1	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BBPPTP Ambon

Capaian kinerja BBPPTP Ambon disajikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis BBPPTP Ambon sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sesuai yang diamanahkan dalam PermenPAN&RB RB Tahun 2014, Laporan Kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Instansi Pemerintah diwajibkan mengevaluasi dan menganalisis kinerja berdasarkan aspek sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran);

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Berdasarkan PMK 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Pengukuran Efisiensi terdiri dari efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I, dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja. Efisiensi RO tingkat satuan di tingkat kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan berikut:

1. Pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia
2. Pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia

Pengukuran efisiensi RO yang dilakukan di tingkat KRO dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((\mathrm{AARO}i \times \mathrm{CRO}i) - \mathrm{RARO}i\right)}{\sum_{i=1}^{n}(\mathrm{AARO}_i)} \times 100\%$$

Keterangan : ERO : efisiensi RO tingkat satuan kerja

AAKRO : alokasi anggaran KRO

RAKRO : realisasi anggaran KRO

CRO : capaian Realisasi RO

Capaian Kinerja sesuai Penetapan Kinerja BBPPTP Ambon disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4 Capaian Kinerja BBPPTP Ambon Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		Kriteria Keberhasilan
			Target	Realisasi	
1	Terjaminnya mutu benih tanaman perkebunan	Persentase Benih Bermutu terhadap total benih pala yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon	80%	80%	Berhasil
		Persentase Benih Bermutu	80%	80%	Berhasil

		terhadap total benih cengkeh yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon			
		Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kakao yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon	75%	75%	Berhasil
		Persentase Benih Bermutu terhadap total benih kelapa yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon	80%	80%	Berhasil
		Persentase Benih Bermutu terhadap total benih sagu yang beredar diwilayah BBPPTP Ambon	75%	75%	Berhasil
2	Terwujudnya layanan pelindungan tanaman Perkebunan	Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa sawit di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%	100%	Berhasil
		Persentase layanan pelindungan komoditas kelapa di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%	100%	Berhasil
		Persentase layanan pelindungan komoditas sagu di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%	100%	Berhasil
		Persentase layanan pelindungan komoditas lada di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%	100%	Berhasil
		Persentase layanan pelindungan komoditas pala di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%	100%	Berhasil
		Persentase layanan	100%	100%	Berhasil

		pelindungan komoditas cengkeh di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon			
		Persentase layanan pelindungan komoditas vanili di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%	100%	Berhasil
		Persentase layanan pelindungan komoditas kopi di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%	100%	Berhasil
		Persentase layanan pelindungan komoditas kakao di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%	100%	Berhasil
		Persentase layanan pelindungan tanaman perkebunan Komoditas Jambu Mete di wilayah kerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Ambon	100%	100%	Berhasil
3	Terwujudnya pelayanan publik Ditjen. Perkebunan berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon yang diberikan	3.00 Skala Likert (1-4)	3.00 Skala Likert (1-4)	Berhasil

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja BBPPTP Ambon tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan terwujudnya layanan Perbenihan

Sasaran kegiatan terwujudnya layanan perbenihan dengan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan dapat tercapai 79%. Capaian tersebut berasal dari terselenggaranya layanan perbenihan terhadap komoditas

perkebunan pada tahun 2025 di wilayah kerja BBPPTP Ambon terhadap komoditas benih Pala , cengkeh, kakao kelapa dan sagu. Capaian masing2 indikator kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengujian Mutu Benih

Untuk kegiatan pengujian mutu benih dilakukan terhadap 21 sampel benih pala, cengkih dan kakao. Jenis pengujian sesuai ruang lingkup yaitu pengujian kadar air, kemurnian fisik dan daya berkecambah. Dari pagu yang telah ditetapkan sejumlah 150.000 batang telah terealisasi sebanyak 209.181 batang terdiri dari benih pala 208.481 benih, cengkih sebanyak 500 benih dan kakao sebanyak 200 benih. Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah masa panen komoditas pala, kakao dan cengkih yang tidak pasti dipengaruhi musim hujan yang berkepanjangan selama tahun 2025 sehingga pengujian tidak bisa dilaksanakan secara terjadwal.

b. Pengawasan Peredaran Benih

Peredaran Benih yang dimaksudkan adalah ketika benih telah dipindah tangankan kepada pihak lain baik secara komersial maupun tidak. Dengan demikian resiko yang ada pada benih tersebut telah berpindah tangan kepada pihak penerima. Pemerintah telah menetapkan aturan-aturan terkait dengan peredaran benih pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar benih yang beredar terjamin mutu dan kualitasnya. Benih yang beredar dimasyarakat merupakan varietas hasil pemuliaan dan introduksi yang sudah dilepas. Benih yang akan diedarkan harus melalui sertifikasi dan memenuhi standart mutu yang ditetapkan oleh pemerintah sebelum diedarkan benih harus bersertifikat dan wajib diberi label. Kegiatan pengawasan peredaran benih dilakukan terhadap kelengkapan dokumen yang meliputi sertifikat dari institusi yang berwenang daerah asal benih, surat pengantar benih, untuk antar pulau di Indonesia atau antar negara dilengkapi surat dari karantina tumbuhan. Berikut hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran benih lintas

provinsi.

Tabel 5 Data Peredaran Benih

No	Nama Produsen/ Alamat	Alamat	Komoditi	Varietas	Jumlah Benih Tersedia
I	**Provinsi Maluku Utara**				
1	Abd. Mutalib Hi. Muhammad	Desa Susupu Kec. Sahu	Pala	Unggul	10.000
2	Malang Kasim	Desa Akediri Kec. Jailolo	Pala	Unggul	350.000
3	Feri Kusuma/Henny	Desa Wosia Kec. Tobelo	Pala	Unggul	89.593
4	Muhammad Habib	Kelurahan Tuguaji Kec. Kota Tidore	Pala	Unggul	430
			Cengkih	-	130
			Kakao	-	300
			Kopi	-	50
			Kayu Manis	-	220
5	Malik Dokomolamo	Kelurahan Toloa Kec. Tidore Selatan	Pala	Lokal	1.000
6	Salim Anto	Desa Togafo, Kec. Ternate Barat	Pala	Unggul	5.000
7	Malang Kasim	Desa Togafo, Kec. Pulau Ternate	Pala	Unggul	15.000
			Cengkih	Unggul	30.000
8	Syarif Hodu	Desa Togafo, Kec. Pulau Ternate	Pala	Unggul	46.000
9	Fadli Muhammad	Desa Loto, Kec. Pulau Ternate	Pala	Unggul	90.000
			Cengkih	Unggul	10.000
10	Ade Tuara	Desa Sulamadaha, Kec. Ternate Barat	Pala	Unggul	3.000
II	**Provinsi Maluku**				
1	Ratna Pelu	Desa Wakal Kecamatan Leihitu	Pala	Unggul Lokal	34.000
			Cengkih	Unggul Lokal	4.000

2	Junaedi Mewar	Desa Wakal Kecamatan Leihitu	Pala	Unggul Lokal	4.000
3	Deddy Leunufna	Desa Layeni Kecamatan TNS	Cengkih Tuni	Unggul Lokal	2.000
			Pala	Unggul Lokal	2.000
			Cengkih Hutan	Lokal	9.000
4	Jhon Maitimu	Desa Layeni Kecamatan TNS	Pala	Unggul Lokal	2.500
5	Hj. N. Latarissa	Desa Rutah Kecamatan Amahai	Pala	Unggul Lokal	11.000
			Cengkih Hutan	Unggul Lokal	2.000
6	Basri Sangaji	Desa Rutah Kecamatan Amahai	Cengkih Hutan	Lokal	13.800
			Pala Papua	Lokal	3.000
			Cengkih Tuni	Unggul Lokal	1.500
			Pala	Unggul Lokal	4.400
7	Hj. Muksin	Desa Rutah Kecamatan Amahai	Cengkih Hutan	Lokal	3.000
8	Yasmin	Desa Rutah Kecamatan Amahai	Cengkih Hutan	Lokal	2.000
			Cengkih Tuni	Unggul	3.000
9	Ibu Fat Wattimena	Desa Rutah Kecamatan Amahai	Cengkih Hutan	Lokal	7.000
10	Siswoyo	Desa Waimital Kecamatan Kairatu	Pala	Unggul	12.000
			Cengkih Tuni	Unggul	12.000
			Cengkih Hutan	Lokal	11.000
11	Onisimus Matital	Dusun Tanopol Desa Piru	Pala	Lokal	3.000
12	Kader Patir	Desa Latu Kecamatan Amalatu	Cengkih Hutan	Lokal	3.000

13	Lamha Tuakia	Namrole	Pala	Lokal	5.000
14	Mat Manilet	Namrole	Cengkih	Unggul	5.000
			Pala	Unggul	10.000
15	Umar Latuamury	Namrole	Pala	Unggul	10.000
TOTAL					**829.923**

Pengawasan peredaran benih dilakukan pada penangkar/ produsen yang berada di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang lebih banyak memproduksi benih tanaman cengkih dan pala. Sementara produsen benih kelapa dan sagu berada provinsi Papua dan Papua Tengah, pengawasan peredarannya dilakukan oleh UPTD setempat yang membidangi pengawasan dan peredaran benih tanaman perkebunan.

Analis penggunaan sumber daya

Petugas pengawas benih tanaman sebagai analis tersedia namun kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pengujian dan pengembangan metode uji perlu ditingkatkan terus menerus guna menunjang hal tersebut diperlukan pelatihan teknis/in house training bagi petugas PBT.

2. Sasaran Kegiatan terwujudnya Layanan Pelindungan

Sasaran kegiatan terwujudnya layanan pelindungan perkebunan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan dapat tercapai 100%. Capaian tersebut berasal dari terselenggaranya layanan pelindungan terhadap komoditas perkebunan pada tahun 2025 di wilayah kerja BBPPTP Ambon yaitu komoditas kelapa sawit , kelapa, sagu, lada, pala, cengkeh, vanili, kopi, kakao, jambu mete serta komoditas semusim dan tahunan.

Layanan tersebut antara lain layanan Pengujian Mutu Agens Pengendali Hayati (APH), layanan Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida, layanan Penyediaan Isolat Agens Pengendali Hayati (APH), layanan Penyediaan Formulasi APH dan Pupuk Hayati, layanan Identifikasi OPT dan Rekomendasi Pengelolaan OPT, dan layanan

Penyediaan Data dan Informasi OPT. Layanan tersebut diselenggarakan untuk keseluruhan komoditas Perkebunan yang ada di wilayah kerja BBPPTP Ambon Capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Rekomendasi Pengendalian Aspidiotus destructor di Selayar Sulawesi Selatan.

Aspidiotus destructor yang biasanya di sebut kutu perisai, karena punggung kutu tertutup lapisan lilin menyerupai perisai. Hama ini berkembang pada musim kemarau. Didaratan rendah daur hidupnya mulai dari fase telur, larva sampai dengan imago mencapai 45-55 hari. Kutu perisai ini mengisap cairan daun kelapa yang agak tua, mulai dari bercak kuning pada pelapah daun sampai pada terkulai dan matinya tajuk kelapa. Selain kelapa, hama ini juga dapat ditemukan pada tanaman mangga, pisang, alpokat, kakao, jeruk, jahe, jambu, papaya, karet, ubi rambat, teh, kapas, tebu, *Artocarpus*, *Pandanus*, *Plumeria,* sukun, *Eugenia malaccensis*, tanaman hias, tumbuhan liar dan tanaman palma lain seperti sagu dan nipah (Hill, 1983; kalshoven, 1981; Beardsley, 1970). Hama ini tersebar di daerah tropis dan subtropis. Penyebaran hama ini diduga terbawah oleh serangga, burung kelalawar, aktivitas manusia dan angin. Evaluasi Pengendalian: Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keberadaan OPT Hal ini dilakukan dengan cara mengamati pohon-pohon kelapa yang menunjukkan gejala serangan, dilakukan secara berkala setiap bulan untuk mengetahui ada tidaknya serangan baru.

Penggunaan musuh alami : Pengendalian menggunakan musuh alami merupakan salah satu usaha pengendalian yang ramah lingkungan dengan cara mengintroduksi musuh alaminya yaitu kumbang *Chilocorus politus* (Mulsant.) Selain itu dapat menjaga populasi hama tetap berada di bawah ambang kendali sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Kumbang

Chilocorus politus (Mulsant.) termasuk dalam family *Coccinellidae* berwarna kuning merah dan berdiameter tubuh 4 mm, larvanya berwarna hitam. Siklus hidup kumbang *Chilocoruspolitus* (Mulsant.) selama 6-7 minggu (dari telur sampai bertelur kembali) dan dapat memangsa 8.400-10.900 ekor hama. Peran Chilocorus sebagai musuh alami ini perlu diperkuat dengan cara menambah populasinya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan perbanyakan di laboratorium atau dengan mendatangkan dari daerah lain. Pemantauan untuk mengetahui sejauh mana populasi predator di lapangan agar dapat efektif mengendalikan hama perlu dilakukan untuk digunakan sebagai dasar perlu tidaknya dilakukan augmentasi. Pada berbagai kasus yang terjadi, penguatan populasi prodator dilakukan dengan cara introduksi/mendatangkan dari daerah yang lain yang memiliki gejala serangan yang sama. *Chilocorus politus* yang dintroduksi dari Yogyakarta telah berhasil mengendalikan serangan kutu perisai di Maluku Tengggara provinsi Maluku dan di kabupaten Tambrau provinsi Papua Barat. Pelepasan predator di kedua daerah tersebut telah berhasil memulihkan pertanaman kelapa dalam waktu relatif cepat kurang dari 1 tahun. Predator *Chilocorus politus* ini selanjutnya dapat dieksplorasi dari areal pertanaman kelapa yang pernah mengalami serangan hama ini dengan mempertimbangkan anggaran tersedia.

Pemantauan : Secara periodik perbulan dilakukan pemantauan untuk memastikan keberadaan predator efektif memulihkan tanaman kelapa. Jika serangan masih tinggi diatas ambang ekonomi maka perlu dilakukan upaya pengendalian lebih lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepadatan mangsa: Semakin tinggi kepadatan populasi mangsa semakin mudah predator menangkapnya. Hal ini karena peluang predator kontak dengan mangsanya semakin tinggi, pada kondisi populasi hama tinggi terjadi kompetisi antar individu. Sebaliknya jika populasi hama rendah, predator semakin sulit menemukan pakan apalagi

populasi mangsa mengelompok. Jika tidak ada mangsa maka predotor akan menjadi kanibalis atau terbang ketempat yang lain untuk mencari mangsa. Kepadatan predator yakni banyaknya predator dalam suatu tempat berhubungan dengan masalah kompetisi. Populasi predator berbanding lurus dengan populasi hama sehingga terjadi kesetimbangan.

Cemiri lingkungan : Lingkungan fisik sangat signifikan berpengaruh terhadap aktivitas predator yang akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian. Hujan lebat mempengaruhi pencemaran predator, namun kurang berdampak pada hama karena berada dibawah daun. Suasana terang dan gelap mempengaruhi jam biologi predator, umumnya pada malam hari predator pasif kecuali pada keadaan sangat lapar. Chilocorus aktif pada jam 8 pagi sampai sore. Lingkungan biologi, seperti ketersediaan pakan utama dan mangsa alternative. **sini**Cemiri mangsa : Hama kutu membentuk perisai sebagai media pertahanan diri dan menjaga telur agar tidak dimangsa. Kutu perisai jawa memiliki perisai yang lebih lunak sedangkan perisai kutu perisai Taruna lebih tahan terhadap predator. Selain itu fase pasif predator dimanfaatkan oleh pemangsa untuk berkembangbiak. Kecepatan mangsa berkembangbiak medengan kecepatan pemangsa mempengaruhi kecepatan pengendalian. Tingkat kepadatan populasi predator pada koloni kutu merupakan faktor yang menentukan efetivitas pengendalian. **sini**Cemiri predator : Kemampuan predator mencari, menemukan, menangkap dan membunuh mangsanya dan pada fase aktif predator memangsa serta kemampuan predator untuk berkembang biak, membentuk generasi selanjutnya untuk cukup mengendalikan populasi mangsa. Cepat lambatnya pengendalian ditentukan oleh tipe pelepasan inokulatif atau inundatif. Inokulatif membutuhkan waktu bagi predator untuk membentuk beberapa generasi untuk mengendalikan mangsa Inundatif hasilnya lebih cepat karena pelepasan predator dalam

jumlah banyak pada fase pemangsa aktif. **sini**Factor social dan ekonomi daerah setempat : Pemanfaatan predator memerlukan waktu untuk menekan hama sehingga kurang diminati oleh petani. Selain itu rendahnya daya beli dan terbatasnya kepemilikan lahan menyebabkan pengendalian secara hayati kurang diminati, dalam berbagai kesempatan pengalaman pengendalian OPT yang telah eksplosif selalu membutuhan campur tangan pemerintah.

b. Rekomendasi Pengendalian OPT layu akibat Pytium pada pembibitan pala.

Spesies Pythium adalah eukariota (memiliki inti sejati) yang memiliki pertumbuhan sel berserabut (seperti benang), coenocytic (benang non-septate tidak memiliki dinding silang). Dinding sel banyak oomycetes terdiri dari selulosa dan -1, 3 glukan dengan jumlah kitin yang minimal. Kitin merupakan komponen utama dinding jamur sejati. Tahap aseksual atau vegetatif Pythium menghasilkan klamidospora (spora istirahat berdinding tebal), sporangia (yang berkecambah secara langsung untuk menghasilkan hifa atau tidak langsung untuk menimbulkan vesikel di luar sporangium, di mana zoospora terbentuk), dan pembengkakan hifa (sporangia bulat- seperti struktur yang tidak menimbulkan zoospora). Selama reproduksi seksual, anteridium membuahi oogonium untuk menghasilkan oospora berdinding tebal. Beberapa spesies Pythium adalah heterotalik dan membutuhkan tipe kawin yang berlawanan untuk bereproduksi secara seksual tetapi kebanyakan homotalik dan tidak memerlukan tipe kawin yang berlawanan. Kunci standar (17;6) membedakan spesies dalam Pythium berdasarkan bentuk, ukuran, dan lokasi pada miselium sporangium, antheridium, oogonium, dan oospora. Tidak semua spesies atau isolat dalam beberapa spesies membentuk zoospora. Zoospora adalah spora aseksual, berflagel ganda, berdinding tipis yang bergerak menuju sel inang tempat mereka berkista. Kista kemudian menghasilkan

tabung kuman dan apresorium yang membantu penetrasi sel inang. Sporangium dari beberapa spesies berkembang biak. Artinya, mereka menimbulkan sporangium tambahan baik di dalam sporangium yang ada atau segera di luar sporangium. Oospora dan sporangia dianggap sebagai struktur kelangsungan hidup utama sebagian besar spesies Pythium (11). Oosporogenesis disukai oleh tingkat salinitas yang konsisten dengan habitat normalnya (misalnya air vs. tanah) (10) serta rasio rendah karbon/nitrogen yang khas pada jaringan inang yang terinfeksi. Salah satu cara untuk menentukan dengan cepat apakah organisme yang Anda periksa adalah Pythium atau menentukan bahwa patogen yang mempengaruhi tanaman adalah Pythium adalah dengan menggunakan kit yang tersedia dari Neogen (ALERT-LF®). Kit ini mudah digunakan dan memberikan hasil dalam waktu sekitar 20 menit. Tes positif memberi tahu Anda bahwa organisme yang ada mungkin dalam genus Pythium. Tidak ada kit untuk mengidentifikasi spesies yang ada. Perhatikan juga bahwa dalam kasus yang jarang terjadi, mungkin ada reaksi silang dengan Phytophthora. Kit untuk mendeteksi Phytophthora tersedia melalui Agdia, Inc. (Immunostrip®) dan Pocket Diagnostic. Kit Pocket Diagnostic® tidak dilisensikan untuk dijual di AS, tetapi tersedia di Kanada. Saat memeriksa hifa untuk menentukan apakah Anda memiliki Pythium, gunakan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya terbalik bekerja sangat baik untuk ini ketika memeriksa agar atau cairan di cawan Petri. Hifa Pythium mungkin memiliki satu atau lebih karakteristik berikut: Spesies Pythium memiliki hifa koentrik (tidak memiliki dinding silang) dan hifa tidak bercabang secara dikotomis (kiri bawah). Sebagai perbandingan, hifa bercabang dikotomi (kanan bawah) memiliki cabang hifa yang sama panjang, setidaknya pada awalnya. Pseudoperonospora, ditunjukkan pada gambar (kanan bawah) (Gerald Holmes, Valent USA Corporation, Bugwood.org), menunjukkan percabangan dikotomis. Panah berwarna yang ditambahkan ke gambar

membantu memvisualisasikan panjang cabang yang sama. Seperti jamur lainnya yang berkembang dengan cara seksual dan aseksual, penelitan para ahli membuktikan perkembangan secara aseksual dari jamur penyebab embun tepung lebih cepat dan berhasil menginfeksi tanaman inang

Penyebab : Untuk menginfeksi tanaman inang, jamur harus berhasil melumpuhkan mekanisme pertahanan tanaman -- parasit harus beradaptasi secara sempurna dengan inangnya. Suhu optimal untuk infeksi adalah antara 20-22^{0}C dan kelembaban relatif antara 40 hingga 100% cukup untuk spora berkecambah. Cahaya rendah dan menyebar juga tampaknya mendukung perkembangan embun tepung. Jamur dapat menyebar dengan cepat karena siklus penyakit dapat diselesaikan hanya dalam waktu 72 jam. Namun, biasanya membutuhkan waktu 7-10 hari dari saat infeksi hingga muncul gejala.

Adapun penyebabnya sebagai berikut: Kelembaban 40-100% dan suhu harian 20-22^{0}C memicu perkembangan spora. Pada pembibitan di Nurseri Makariki dilaporkan adanya genangan dimusim hujan

c. Rekomendasi penggunaan bahan dan lingkungan yang tepat untuk koleksi isolat *Beauveria bassiana*.

APH merupakan bahan pengendali OPT yang sangat rentan terhadap perubahan suhu dan kelembaban. Pada saat terjadi perubahan suhu dan kelembaban, kondisi APH akan sangat berpengaruh, sehingga efektivitasnya di lapangan dapat menurun. Daya simpan APH belum terukur dengan baik. Secara umum APH disimpan di lemari pendingin pada suhu $\pm$5^{0}C dan di suhu ruang pada kisaran suhu 26-30^{0}C. Namun belum dapat diukur viabilitas dan kerapatannya, jika disimpan dalam waktu lama. Sebagai laboratorium acuan, laboratorium mikologi melaksanakan kegiatan uji daya simpan APH golongan jamur

yakni *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae* dan *Trichoderma* sp. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berapa lama APH dapat bertahan dalam kondisi suhu ruang dan di lemari es, untuk dapat digunakan dalam pengendalian OPT di lapangan. Contoh uji APH yang diuji di laboratorium jarang sekali dibuat contoh duplo karena sifat APH golongan jamur yang mudah berubah dari kondisi aslinya. APH sering kali menunjukan pertumbuhan dengan kurva bel normal, dimulai dari kecambahan, pertumbuhan optimum, maksimum sampai dengan kondisi dorman atau mati. Apabila kondisi lingkungan memungkinkan pertumbuhan spora berkembang dengan cepat. Kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh adalah suhu dan kelembaban serta pencahayaan. Beberapa jenis spora menunjukan respon negatif pada cahaya sehingga berkembang pesat di tempat gelap. Beberapa jenis spora menunjukan respon perkembangan yang lebih baik pada saat kelembaban tinggi, namun akan membentuk sporangium ketika suhu menurun. Kondisi lingkungan yang sangat fluktuatif juga dapat berpengaruh pada pertumbuhan antagonis APH yang diinginkan, sehingga sering terjadi kontaminasi. Untuk menjaga agar kondisi contoh uji tindak berubah, dan dapat dibuat duplo maka dibuat pengujian daya simpan APH. Kegiatan uji daya simpan APH ini dilaksanakan oleh analis dan calon analis, dengan harapan kompetensi analis dan calon analis dapat berimbang dan bahkan meningkat. Kegiatan Uji Daya Simpan APH *Beauveria bassiana* dilakukan dengan 3 perbedaan suhu yaitu suhu $\underline{-4}^0$C, suhu $\underline{+}5^0$C dan di suhu ruang pada kisaran suhu 26-30^{0}C. Parameter yang diamati kegiatan pengujian tersebut yaitu kerapatan spora(Spora/ml) dan viabilitas APH (%/ml) Hasil yang didapatkan dalam kegiatan pengujian uji daya simpan APH *Beauveria bassiana* yaitu semakin tinggi suhu penyimpanan di atas batas optimalnya, maka kualitas (viabilitas dan kerapatan) APH *Beauveria bassiana* akan menurun lebih cepat. Jamur Beauveria bassiana membutuhkan suhu hangat untuk

tumbuh dan membentuk spora. Pada suhu -4^{0}C , suhu ini terlalu dingin bagi jamur untuk beraktivitas. Pada suhu beku, metabolisme jamur istirahat (dormansi) . Jamur tidak akan mati (jika sudah ada sporanya) . Pengujian ini menunjukkan variasi kualitas yang sangat kontras di antara tiga sampel agen pengendali hayati yang diperiksa dengan berbagai perbedaan suhu penyimpanan. Sampel pada suhu -4^{0}C memiliki kualitas terbaik karena memiliki kerapatan spora paling tinggi dengan tingkat viabilitas yang sempurna. Hasil ini diikuti oleh sampel pada suhu ±5^{0}C yang memiliki kualitas sangat baik . Kedua sampel ini dinyatakan memenuhi standar mutu dan sangat layak untuk diaplikasikan di lapangan karena memiliki konsentrasi sporanya tinggi dan kemampuannya untuk tumbuh dengan aktif. Sedangkan pada suhu ruang 26-30^{0}C menunjukkan kegagalan teknis dalam pengujian. Hasil pengamatan dalam beberapa bulan menunjukkan sampel memiliki kerapatan 0 spora/ml dan tingkat viabiltas 0,00% yang berarti tidak ditemukan adanya spora hidup atau aktif di dalam sampel tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada suhu rendah pengaruh terhadap spora menunda pembentukan spora tetapi mengawetkan yang sudah ada sedangkan pada suhu hangat mempercepat produksi spora namun lama kelamaan spora akan mati, pada suhu ini sebaiknya digunakan hanya saat fase pertumbuhan agar jamur cepat berspora. Sampel pada suhu -4^{0}C dan pada suhu ±5^{0}C memiliki potensi daya simpan lama. Paling direkomendasikan dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan penggunaan dan ketahanan spora yaitu pada suhu ±5^{0}C.



Gambar 2 Kegiatan Uji APH

d. Pengawasan mutu APH (kerapatan, Viabilitas dan Qualilty control bahan uji).

Jumlah pengujian mutu APH sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 6 Rekapan Pengujian Mutu APH Januari - Desember 2025

No	Jenis APH	Jumlah Sampel	Jenis Pengujian	Jlh Pengujian
1	*Trichoderma sp*	15	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	15
2	*Metarhizium anisopliae*	6	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	6

3	*Beauveria bassiana*	13	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	13
4	*Verticillium sp*	1	Kerapatan spora dan Viabilitas spora	1
	Jumlah	**35**		**35**

Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi maka laboratorium BBPPTP Ambon menerapkan Quality control sesuai ISO IEC 17025:2027 Quality Control Laboratorium adalah bagian dari sistem manajemen kualitas di suatu laboratorium yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dan hasil pengujian atau analisis laboratorium mengikuti standar kualitas yang ditentukan. Quality Control Laboratorium bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang sesuai, mengembangkan metode pengujian yang valid, melakukan pengujian kontrol kualitas yang berkala, serta melakukan analisis terhadap hasil pengujian laboratorium. Tujuan dari Quality Control Laboratorium adalah untuk memastikan bahwa semua pengujian dan hasilnya akurat, konsisten, dapat diandalkan, dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hal ini penting dalam menjaga kualitas produk atau layanan yang dihasilkan oleh laboratorium tersebut. Quality Control (QC) laboratorium adalah departemen penting dalam suatu perusahaan atau institusi yang memiliki fungsi memastikan produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

e. Uji Sterilisasi Autoclave dengan Menggunakan Sterikon Plus Bioindikator

Proses sterilisasi basah dengan menggunakan autoclave dilaksanakan di laboratorium Mikologi BBPPTP Ambon dengan menggunakan *sterikon plus bioindikator* untuk pemantauan kinerja alat (*Autoclave*) yang dilakukan secara rutin untuk mengetahui proses dan hasil sterilisasi alat dan bahan yang dapat menghasilkan autoclave yang memenuhi standar dan

tidak terjadi kontaminisasi terhadap bahan maupun alat yang disterilasi didalam autoclave.

Tabel 7 Hasil Uji Sterilisasi Autoclave dengan menggunakan sterikon plus Bioindikator

Perlakuan	Perubahan Warna (Setelah di Autoclave) Ulangan 1	Perubahan Warna (Setelah di Autoclave) Ulangan 2	Perubahan Warna (Setelah di Inkubasi suhu 60°C) Ulangan 1	Perubahan Warna (Setelah di Inkubasi suhu 60°C) Ulangan 2	Ket.
Autoclave	Ungu violet	Ungu violet	Ungu violet	Ungu violet	Steril
Kontrol Autoclave	Tidak di autoclave	Tidak di autoclave	Ungu violet	Ungu violet	Steril
Kontrol Negatif	-	-	-	-	Steril

Berdasarkan hasil uji kontaminasi pada Autoclave tidak terdapat kontaminasi pada alat. Hal ini mengindikasikan bahwa proses sterilisasi yang dihasilkan dapat maksimal. Dan tidak menunjukan perubahan warna yaitu Ungu Violet yang menandakan Autoclave tersebut Steril.



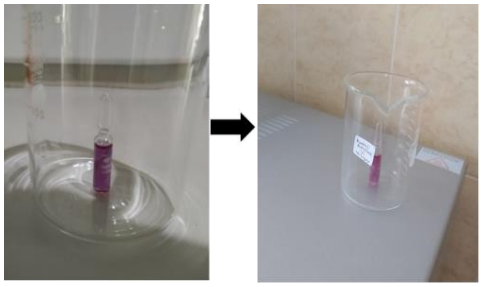
Gambar 1. Melakukan Bioindikator Sterikon Plus di Alat Autoclave



Gambar 2. Warna Bioindikator Sterikon plus di alat utoclave



Gambar 3. Bioindikator Sterikon plus di Laminar airflow



Gambar 4. Bioindikator Sterikon plus Perlakuan Kontrol



Gambar 5. Inkubator dengan temperatur 60°C selama 48 Jam

Gambar 3 Uji Sterilisasi Autoclave dengan Menggunakan Sterikon Plus Bioindikator

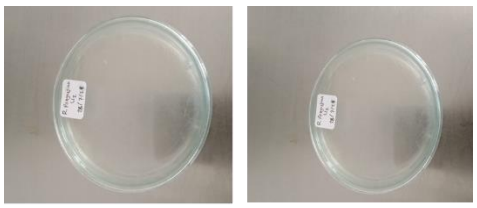
f. Uji Sterilisasi Laminar Air Flow (LAF) dan Ruangan Pengujian Mutu APH dengan Cawan Petri.

Pengujian hasil uji sterilitas menggunakan cawan petri pada pengujian dilakukan pada tanggal 25 sd 28 September 2025.

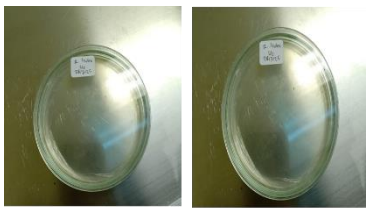
Tabel 8 Uji Sterilitas Menggunakan Cawan Petri

Tempat pengujian	Jumlah Koloni (Ulangan I)	Jumlah Koloni (Ulangan II)
Ruang Pengujian Mutu APH	0	0
Ruang Perbanyakan APH	0	0
Ruang ISOLASI	0	0
Laminar Air Flow	0	0

Dari hasil pengujian ulangan uji sterilitas dengan media cawan petri pada pengamatan hari ke-5 didapatkan hasil bahwa pada cawan petri yang diletakkan di Ruang Pengujian Mutu APH (ulangan I) terdapat koloni mikroorganisme tidak ada koloni. Pada Ruang Pengujian Mutu APH (ulangan II) tidak terdapat koloni mikroorganisme. Pada ruang perbanyakan APH (ulangan I) tidak terdapat koloni, dan ruang perbanyakan APH (ulangan II) tidak terdapat koloni. Pada LAF (ulangan I) tidak terdapat koloni mikroorganisme dan LAF (ulangan II) tidak terdapat koloni mikroorganisme. Pada cawan petri yang diletakkan di Ruang IsolasI (ulangan I) tidak terdapat koloni mikroorganisme dan pada Ruang Isolasi (ulangan II) tidak terdapat koloni mikroorganisme yang muncul pada media pengujian. Hal ini disebabkan karena saat dilakukan pengujian ulangan pada Laboratorium sedang dalam kondisi steril sehingga membuat tidak adanya kontaminasi pada ruangan - ruangan dan instrument alat uji



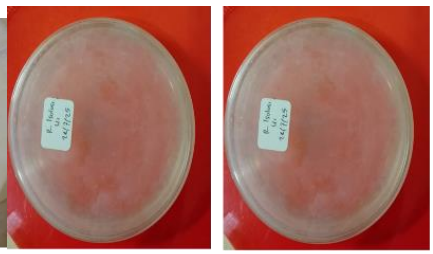
Gambar 7. Pengamatan Pertumbuhan Koloni di Laminar Air Flow



Gambar 8. Pengamatan Pertumbuhan Koloni di ruang Isolasi



Gambar 9. Pengamatan Pertumbuhan Koloni di ruang Isolasi



Gambar 10. Pertumbuhan Koloni di Ruang Perbanyakan APH

Gambar 4 Uji Sterilisasi Laminar Air Flow (LAF) dan Ruangan Pengujian Mutu APH dengan Cawan Petri.

Pada ruangan – ruangan pengujian dan alat – alat pengujian terutama *Laminar Air Flow* (LAF), Meja dan dinding dalam LAF disemprot dengan alcohol 70% untuk mensterilkan LAF dan perlu dilakukan kebersihan secara rutin dan menyeluruh setiap 2-3 hari sekali dikarenakan tidak muncul pertumbuhan

mikroba. Untuk Autoclave setiap selesai digunakan air didalam Autoclave harus dibuang dan Autoclave di bersihkan menggunakan detergent kemudian di lap kering.

g. Perbanyakan larva Oryctes sp dalam rangka pemurnian APH *Metarhizium anisopliae.*

Dalam menunjang kegiatan Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Ambon dalam hal ini di bidang peroteksi tanaman perkebunan, maka ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain aplikasi jamur *Metharizium* sp pada hama *Oryctes* sp di rumah kaca. Aplikasi jamur *Metarhizium anisopliae* ini akan diharapkan akan menginfeksi dan menyebabkan kematian pada larva *Oryctes* sp. Jamur yang digunakan tersebut diaplikasikan dengan cara menyemprot ke tubuh larva *Oryctes* sp yang terdapat di dalam wadah plastic. Dari hasil aplikasi jamur tersebut selama beberapa hari, terlihat adanya larva *Oryctes* sp yang mengalami kematian. Larva *Oryctes* sp yang mati kemudian dilakukan inokulasi untuk mendapatkan jamur *Metharizium* sp.



Gambar 5 Perbanyakan Larva Oryctes sp

Dari hasil inokulasi tersebut diharapkan akan memperoleh jamur *Metharizium* sp yang spesifik dan tidak terkontaminasi oleh jamur-jamur yang lain. Hasil pengamatan yang telah di tetapkan mulai dari tanggal 1- 31 Juli 2025, diperoleh bahwa larva *Oryctes* sp ada yang mengalami kematian pada tanggal 4 Juli 2025, dan

kemuadian larva tersebut dilakukan inokulasi untuk melihat jamur apa yang tumbuh. Dari hasil inokulasi tersebut diperoleh bahwa jamur yang tumbuh pada larva *Oryctes* sp tersebut adalah jamur *Metharizium* sp dan *Tricoderma* sp yang terlihat pada waktu pengamatan.

h. Evaluasi pemanfaatan APH Trichoderma sp, untuk pengendalian busuk buah basah/kering pada tanaman pala oleh LUPH Ternate di kecamatan Fitu.

Metarhizium anisopliae untuk mengendalikan Brontispha longisima dan Oryctes rhinoceros pada tanaman kelapa di desa Jambula Kota Ternate Trichoderma sp, untuk pengendalian busuk buah basah/kering pada tanaman pala oleh LUPH Ternate di kecamatan Fitu Metarhizium anisopliae untuk mengendalikan Oryctes Rhinoceros pada tanaman kelapa di Fitu Beauveria bassiana untuk mengendalian hama PBK pada kakao dan PBKo pada kopi. Trichoderma sp, untuk pengendalian busuk buah basah/kering pada tanaman pala oleh LUPH Ternate di Gambesi Metarhizium anisopliae untuk mengendalikan Oryctes Rhinoceros pada tanaman kelapa di Gambesi.

i. Pengujian mutu produk pala terhadap cemaran aflatoksin

Merupakan salah satu tahapan penting dalam menjamin keamanan pangan serta meningkatkan daya saing komoditas pala Indonesia di pasar nasional dan internasional, mengingat pala merupakan komoditas ekspor strategis yang wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan. Aflatoksin merupakan senyawa toksik yang dihasilkan oleh kapang *Aspergillus* sp. yang dapat mencemari biji pala akibat penanganan panen dan pascapanen yang kurang optimal, seperti proses pengeringan yang tidak tuntas, sanitasi yang rendah, serta penyimpanan pada kondisi kelembapan tinggi, sehingga selain berdampak negatif terhadap kesehatan konsumen juga berpotensi menyebabkan penolakan produk pala

di pasar ekspor. Oleh karena itu, kegiatan pengujian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat cemaran aflatoksin pada biji pala sekaligus sebagai dasar pengendalian mutu dan penyusunan rekomendasi perbaikan penanganan pascapanen guna mendukung jaminan mutu hasil pertanian. Tim Layanan Laboratorium Mikotoksin BBPPTP Ambon telah melaksanakan pengujian mutu terhadap 14 sampel biji pala yang diambil secara acak dari pelaku usaha dan petani, yang meliputi sampel biji pala dari CV. Sumber Berkat Pratama dengan asal Buru Selatan, Maluku Utara, Hatu, dan Seram Bagian Barat (SBB), sampel biji pala dari CV. Mainusu dengan asal Namlea, sampel biji pala dari petani di Desa Rumah Kai, Kabupaten Maluku Tengah, yang terdiri atas varietas pala Banda dan pala Papua, serta sampel biji pala yang berasal dari Ternate. Pelaksanaan pengujian oleh Tim Layanan Laboratorium Mikotoksin BBPPTP Ambon dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2025 menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) atau High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Berdasarkan hasil pengujian, terdeteksi cemaran aflatoksin pada 4 sampel biji pala, dengan aflatoksin B1 sebagai jenis yang dominan dan tingkat kontaminasi yang bervariasi dari kategori rendah hingga sangat tinggi; sampel asal Namlea, Buru Selatan, dan Maluku Utara menunjukkan kadar aflatoksin B1 yang sangat rendah masing-masing sebesar 0,073 ppb, 0,255 ppb, dan 0,304 ppb, sedangkan pada sampel biji pala asal Seram Bagian Barat ditemukan lonjakan kadar cemaran yang signifikan, yaitu sebesar 25,462 ppb untuk aflatoksin B1 dan 0,505 ppb untuk aflatoksin B2. Tingginya kadar tersebut mengindikasikan adanya infeksi jamur *Aspergillus flavus* yang berat, yang kemungkinan besar disebabkan oleh proses pengeringan yang tidak tuntas atau kondisi penyimpanan di gudang pelaku usaha yang lembap dalam jangka waktu lama. Sementara itu, 10 sampel biji pala lainnya dinyatakan tidak terdeteksi mengandung aflatoksin, baik jenis B1, B2, G1, maupun G2. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan

kegiatan, masih ditemukan beberapa kendala teknis yang memerlukan perhatian serius untuk menjamin validitas hasil pengujian di masa mendatang, terutama terkait dengan kompetensi personel laboratorium yang perlu terus ditingkatkan seiring perkembangan metode analisis melalui pelaksanaan uji banding antar analis guna menilai dan menjamin kompetensi personel, memastikan akurasi dan presisi hasil pengujian, membandingkan kinerja antar analis, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik, serta memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu laboratorium sesuai ISO/IEC 17025 agar data yang dihasilkan valid, terpercaya, dan konsisten. Selain itu, terdapat kendala pada ketersediaan bahan habis pakai, di mana larutan standar aflatoksin dan kolom *Immuno Affinity Column* (IAC) yang tersedia telah melewati masa kedaluwarsa, sehingga diperlukan pengadaan segera bahan pelarut, larutan standar, dan kolom IAC yang baru untuk memastikan kelancaran operasional laboratorium serta keandalan hasil analisis.

Kendala : Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengujian tahun 2025, ditemukan hambatan teknis dan operasional sebagai berikut:

1) Ketersediaan Bahan Habis Pakai: Stok bahan pengujian krusial, khususnya larutan standar aflatoksin dan kolom *Immuno Affinity Column* (IAC), telah melewati masa kedaluwarsa, yang menghambat kelancaran analisis.

2) Kompetensi Personal: Diperlukan peningkatan kompetensi personel yang berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan standar metode analisis terkini dan persyaratan sistem manajemen mutu.

3) Kondisi Mutu Sampel (Faktor Eksternal): Ditemukan lonjakan kadar aflatoksin yang ekstrem pada sampel asal Seram Bagian Barat, yang mengindikasikan buruknya manajemen pascapanen di tingkat pengumpul/gudang.

4) Resiko Instrumen: Potensi gangguan teknis pada instrumen HPLC jika tidak dilakukan pemeliharaan preventif secara disiplin.

Rencana tindak lanjut : Sebagai langkah perbaikan dan mitigasi, disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

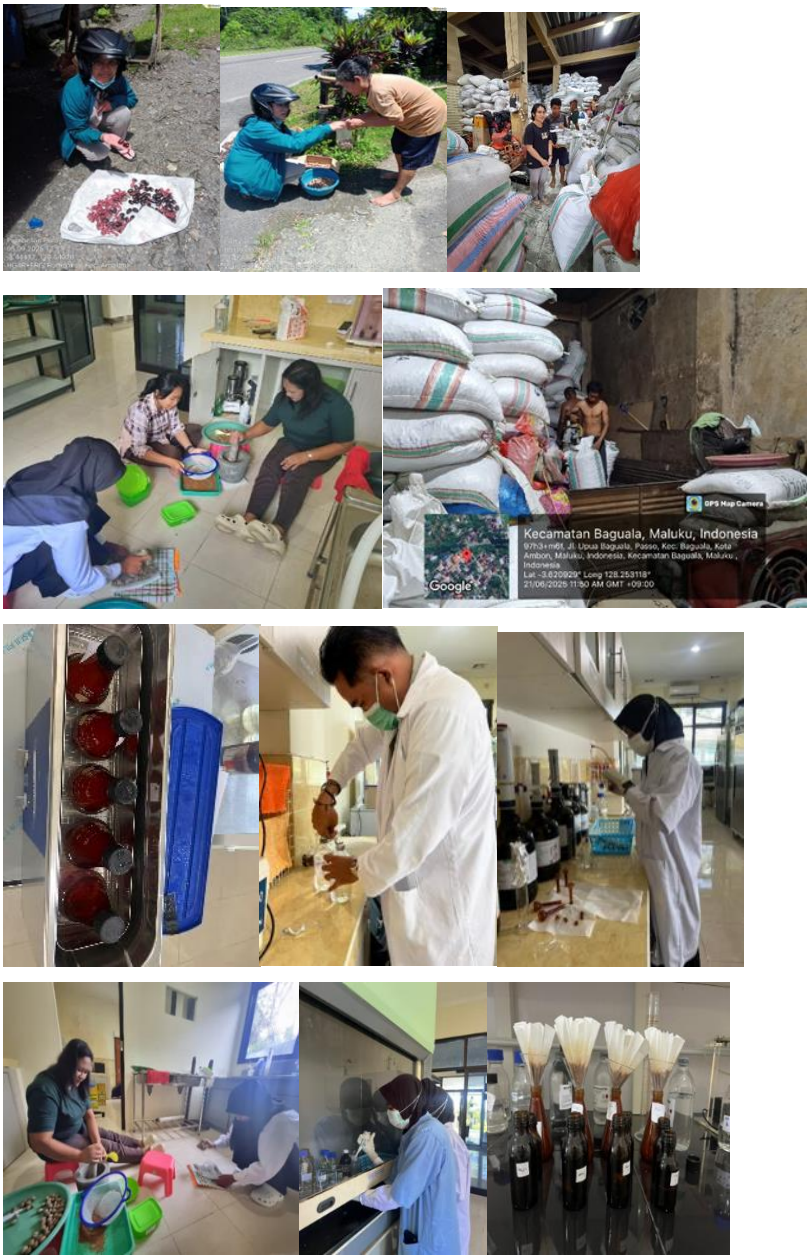
1) Pengadaan bahan di Laboratorium: Melakukan pengadaan segera untuk bahan pelarut, larutan standar baru, dan kolom IAC guna menggantikan stok yang kedaluwarsa.

2) Peningkatan Kompetensi SDM: Melaksanakan pelatihan intensif bagi personel.dan Melakukan uji banding antar analis secara berkala untuk menjamin akurasi, presisi, dan validitas data sesuai standar ISO/IEC 17025.

3) Pemeliharaan Instrumen: Menjadwalkan *maintenance* rutin pada instrumen HPLC untuk meminimalisir kesalahan teknis saat analisis.

4) Edukasi Lapangan: melakukan edukasi sanitasi pada gudang pengumpul (CV), khususnya terkait sirkulasi udara dan kontrol kelembapan, guna mencegah pertumbuhan *Aspergillus flavus* dan edukasi pasca panen pala pada petani.

5) Keberlanjutan Program: Melanjutkan pengujian aflatoksin secara rutin sebagai bentuk pengawasan mutu komoditas pala.



Gambar 6 Melanjutkan Pengujian Aflatoksin secara rutin

j. Menyusun bahan rekomendasi terkait residu pestisida dan herbisida pada tanaman kopi.

Rekomendasi ini ditujukan untuk Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Gorontalo, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Papua, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat. Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian nomor B-1997/KB.210/E.5/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal adanya notifikasi ketidaksesuaian biji kopi Indonesia ke Jepang akibat temuan berulang residu insektisida isocarp dan herbisida 2,4-D pada biji kopi asal Indonesia. upaya minimalkan cemaran pada produk kopi, sebagai berikut :

- Pengaturan waktu penyemprotan, Pengaturan waktu pemberian insektisida mempengaruhi kadar residu pestisida pada hasil pertanian. Waktu efektif yang disarankan lebih dari 6 hari sebelum pemanenan. semakin lama waktu aplikasi akan semakin berkurang residu pestisida di hasil pertanian maupun tanah. Apabila hal ini diterapkan pada waktu panen, maka penyemprotan pestisida harus dilakukan jauh hari dari masa panen untuk memastikan kadar residu pestisida yang tertinggal pada hasil pertanian makin sedikit atau bahkan hilang (Fitiadi dan Putri, 2016).

- Penggunaan arang aktif, Arang aktif dapat dibuat dari limbah pertanian seperti sekam padi atau tempurung kelapa. Aplikasi arang aktif di tanah dapat menurunkan residu pestisida organoklorin (lindan, aldrin, dieldrin, DDT, endosulfan dan heptaklor), organofosfat (klorpirifos, diazinon) dan karbamat (karbofuran) dengan kisaran 70 - 90%. Arang aktif yang berasal dari sekam padi atau tempurung kelapa memiliki daya serap yang tinggi terhadap residu pestisida.

- Pembersihan tanah, Metode pembersihan tanah, dengan menerapkan **bioremediasi tanah** menggunakan mikroba pengurai (seperti *Burkholderia*) dan bahan organik (kompos/biochar) yang mempercepat oksidasi residu.

Pembuatan lubang biopori yang diisi bahan organik dapat mempercepat proses bioremediasi tanah.

- Pencucian pada hasil panen, Pencucian hasil panen dapat dilakukan dengan penggunaan air garam dan air mengalir. Campuran garam dan air dengan perbandingan 1:10 dapat digunakan untuk mengurangi residu pestisida pada biji kopi. Tingkat efektifitas akan meningkat dengan dilanjutkan pencucian dengan air mengalir (Fitriadi, 2002). Pada kopi pencucian dapat dilakukan setelah panen, sebelum proses pengelupasan. Pencucian biji kopi dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengurangi cita rasa kopi.

- Perlu adanya sosialisasi budidaya kopi organik untuk pekebun dan pelaku usaha untuk meminimalkan penggunaan pestisida dan herbisida. Pengendalian gulma dapat dilakukan dengan membiarkan bebek mencari makanan pada areal perkebunan kopi. Secara alami bebek dapat menekan perkembangan gulma dan sekaligus sebagai predator untuk hama. Pengendalian hama pada tanaman kopi dapat dilakukan dengan metode PHT secara alami dengan menggunakan agens hayati *Beauveria bassiana.* Pengendalian secara kimia merupakan pilihan terakhir bila serangan diatas ambang batas ekonomi dan dapat aplikasikan secara bijak dimana pengguna pestisida wajib membaca dan menaati keterangan pada label produk.

- Pengamatan dan pelaporan secara berkala sangat penting dalam pengambilan keputusan pengendalian. Untuk itu perlu peran serta Dinas yang membidangi perkebunan sesuai wilayah kerjanya dan pemangku kepentingan terkait.

Analis penggunaan sumber daya

1. Sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan masih perlu ditingkatkan untuk menerbitka rekomendasi teknis proteksi. Guna

menunjang hal tersebut diperlukan pelatihan teknis/in house training bagi petugas POPT dan PMHP.

2. Sarana dan prasarana laboratorium perlu ditingkatkan agar dapat memperluas ruang lingkup pengujian dan identifikasi guna penerbitan rekomendasi teknis.
3. Metode pengujian perlu terus di validasi untuk mendapatkan hasil yang valid.

B. Realisasi Anggaran berdasarkan KRO/RO

Berdasarkan pagu anggaran sesuai revisi anggaran BBPPTP Ambon Tahun 2025 realisasi anggaran dari pagu Rp. 58.548.534.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.532.929.934,- atau 96,56%. Realisasi anggaran berdasarkan KRO/RO dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 9 Realisasi Anggaran

Program	Kegiatan	KRO	TVKRO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	RDK OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (unit)	4	937.500.000	733.937.126
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1779 Pelindungan Perkebunan	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Unit)	20	1.511.174.000	1.495.392.905
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1777 Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	RAI Sarana Pengembangan Kawasan (Unit, Hektar)	200	1.371.780.000	1.346.934.133
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5890 Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	BJA Penyidikan dan Pengujian Produk (Produk)	650.000	937.346.000	774.193.814

EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5888 Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	RAI Sarana Pengembangan Kawasan (Unit, Hektar)	6.300	45.338.000.000	43.973.264.818
WA Program Dukungan Manajemen	1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	2	59.000.000	58.326.085
WA Program Dukungan Manajemen	1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	3	8.317.734.000	8.074.881.053
WA Program Dukungan Manajemen	1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	74	76.000.000	76.000.000

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (penggunaan anggaran) dan analisis program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10 Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Sasaran Kegiatan di wilayah kerja BBPPTP Ambon

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					EFISIENSI	NILAI EFISIENSI (%)	KET
		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN		FISIK					
		Rp.	VOL	SAT	Rp.	(%)	VOL	SAT	(%)			
1	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	937.500.000	4	unit	733.937.126	78,29	4	unit	100	21,71	104,28	
2	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.511.174.000	20	Unit	1.495.392.905	98,96	20	Unit	100	1,04	52,61	
3	Sarana Pengembangan Kawasan	1.371.780.000	200	Ha	1.346.934.133	98,19	200	Ha	100	1,81	54,53	
4	Penyidikan dan Pengujian Produk	937.346.000	650.000	Produk	774.193.814	82,59	209.181	Produk	32	-156,6	-341,62	
5	Sarana Pengembangan Kawasan	45.338.000.000	6.300	ha	43.973.264.818	96,99	6.300	ha	100	3,01	57,53	
6	Layanan Manajemen Kinerja Internal	59.000.000	2	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	58.326.085	98,86	2	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	100	1,14	52,86	
7	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8.317.734.000	3	Orang, Layanan, Rekomendasi	8.074.881.053	97,08	3	Orang, Layanan, Rekomendasi	100	2,92	57,30	
8	Layanan Manajemen SDM Internal	76.000.000	74	Orang, Layanan, Rekomendasi	76.000.000	100,00	74	Orang, Layanan, Rekomendasi	100	0,00	50,00	
9	TOTAL/RATA-RATA	58.548.534.000			56.532.929.934	96,56					12,50	

C. Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun sebelumnya

1. Perbandingan Capaian Kinerja Utama

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, capaian kinerja BBPPTP Ambon pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024. Secara umum, seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai dengan kategori **berhasil**, bahkan sebagian indikator menunjukkan capaian yang lebih optimal.

Pada Tahun 2024, capaian kinerja telah berada pada kategori baik, namun masih ditemukan beberapa indikator yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target, khususnya pada indikator yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan keterbatasan sumber daya. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, penyempurnaan perencanaan, penguatan koordinasi, serta peningkatan pengendalian pelaksanaan kegiatan berdampak pada meningkatnya tingkat ketercapaian indikator kinerja utama. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

2. Perbandingan Efisiensi dan Realisasi Anggaran

Dari aspek pengelolaan anggaran, realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan Tahun 2024. Pada Tahun 2024, realisasi anggaran telah mencapai kategori sangat baik, namun pada Tahun 2025 tingkat serapan anggaran meningkat dan lebih optimal seiring dengan meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Realisasi anggaran Tahun 2025 yang tinggi juga diiringi dengan pencapaian fisik kegiatan yang optimal, sehingga mencerminkan kesesuaian antara penggunaan anggaran dengan hasil yang dicapai.

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan serapan anggaran pada Tahun 2025 tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan layanan organisasi.

Tabel 11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Analisis
1	Pagu Anggaran	24.549.276.000	58.548.534.000	Peningkatan pagu seiring perluasan program
2	Realisasi Anggaran	95,90%	96,56%	Terjadi peningkatan serapan
3	Capaian Fisik	Hampir 100%	100%	Konsistensi pelaksanaan kegiatan
4	Efisiensi Anggaran	Baik	Lebih efisien	Penggunaan anggaran semakin optimal

Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja difokuskan pada kualitas layanan rekomendasi dan tingkat kepuasan masyarakat, dengan realisasi kinerja disajikan dalam bentuk jumlah layanan. Sementara itu, pada Tahun 2025 dilakukan penyempurnaan indikator kinerja, dengan fokus pada hasil (outcome) berupa terjaminnya mutu benih tanaman perkebunan dan terwujudnya layanan pelindungan tanaman perkebunan, yang diukur langsung dalam bentuk persentase capaian.

Perubahan indikator dan satuan pengukuran tersebut merupakan bagian dari penyesuaian perencanaan kinerja agar lebih mencerminkan hasil yang dicapai Oleh karena itu, perbandingan kinerja Tahun 2024 dan 2025 dilakukan secara substantif, dengan mengaitkan indikator layanan pada Tahun 2024 sebagai pendukung capaian pada Tahun 2025.

D. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2025 dibanding dengan target Jangka Menengah (Renstra)

Capaian Tahun 2025 sebagai tahun pertama periode Renstra menunjukkan bahwa indikator strategis telah berada pada jalur yang sesuai dengan target jangka menengah. Pencapaian 100 persen pada layanan perbenihan dan pelindungan tanaman menjadi baseline yang kuat untuk menjaga konsistensi kualitas layanan hingga akhir periode 2029.

Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2025–2029	Target 2025	Realisasi 2025	Kontribusi terhadap Target 5 Tahun	Analisis
1	Terjaminnya mutu benih tanaman perkebunan	Persentase layanan pengawasan dan sertifikasi benih	100% konsisten setiap tahun	100%	100%	Tahun dasar (baseline) tercapai	Menjadi fondasi stabilitas mutu hingga 2029
2	Terwujudnya layanan pelindungan tanaman perkebunan	Persentase layanan pelindungan tanaman	100% konsisten setiap tahun	100%	100%	Tahun awal tercapai penuh	Sistem operasional siap mendukung target jangka menengah
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥3,30 pada 2029	≥3,10	3,18	96% dari target akhir Renstra	Tren positif menuju target akhir periode

E. Capaian Kinerja Lainnya

1. Nurseri

a. Pelaksanaan Nurseri Konvensional Makariki

Benih yang diproduksi di Nurseri Konvensional Makariki tahun 2025 yaitu komoditas pala sebanyak 5.000 batang yang telah disemai di Bulan Desember 2025. Benih diambil dari Blok Penghasil Tinggi Pala Banda milik Darwis Magrib di Kecamatan Banda, Kab. Maluku Tengah. Benih pala baru bisa disemai di bulan Desember dikarenakan semua Kebun Sumber Benih pala di Maluku gagal panen.

Untuk benih pengadaan tahun 2023 dan 2024 yang masih dipelihara di tahun 2025 adalah sebanyak 10.572 batang (sisa TA 2023) dan 7.974 batang (TA 2024) pala varietas Banda. Dari benih sisa anggaran tahun 2023 yang ada telah lulus sertifikasi dan telah disalurkan ke 4 (empat) desa di Kabupaten Maluku Tengah, 11 (sebelas) desa di Kabupaten Seram Bagian Barat dan 1 (satu) desa di Kota Ambon. Sedangkan untuk benih produksi TA 2024 disalurkan ke Kodam Pattimura sejumlah 1.000 batang dan 6.974 disalurkan ke Kabupaten Buru.

Tabel 123 Daftar penyaluran sisa benih TA 2023:

No	Desa Penerima Bantuan	Komoditi	TA	Jumlah (batang)
1	Desa Layea, Kec. Seram Utara Barat, Maluku Tengah	Pala	2023	2.500
2	Desa Haruru, Kec. Amahai, Maluku Tengah	Pala	2023	500
3	Desa Wailulu, Kec.Seram Utara Barat, Maluku Tengah	Pala	2023	500
4	Desa Malaku, Kec. Seram Utara, Maluku Tengah	Pala	2023	1.000
5	Desa Rumberu (Kawatu), Seram Bagian Barat	Pala	2023	480
6	Desa Rambatu, Seram Bagian Barat	Pala	2023	480
7	Desa Hukuanakota, Seram Bagian Barat	Pala	2023	720
8	Desa Honitetu, Seram Bagian Barat	Pala	2023	312
9	Desa Kairatu (Lemahu), Seram Bagian Barat	Pala	2023	384
10	Desa Uraur, Seram Bagian Barat	Pala	2023	480
11	Desa Kairatu (Pakarena), Seram Bagian Barat	Pala	2023	440

12	Desa Waesamu, Seram Bagian Barat	Pala	2023	480
13	Desa Tehulele, Seram Bagian Barat	Pala	2023	408
14	Desa Piru, Seram Bagian Barat	Pala	2023	480
15	Desa Elpaputih, Seram Bagian Barat	Pala	2023	408
16	Desa Poka, Kota Ambon	Pala	2023	1.000
Total				**10.572**

b. Nurseri Bacan

Benih yang diproduksi di Nurseri Konvensional Bacan tahun 2025 yaitu komoditas pala Ternate 1, sebanyak 20.000 batang yang telah disemai pada bulan Oktober 2025. Benih pala Ternate 1 diambil dari Blok Penghasil Tinggi Pala Ternate 1 milik Hamadal Minggu dan Salim Anto di Kota Ternate, Maluku Utara. Keterlambatan penyemaian benih TA 2025 ini dikarenakan banyaknya produsen pala yang gagal panen karena cuaca ekstrim.

Untuk benih pengadaan tahun 2023 yang masih dipelihara di tahun 2025 telah disertifikasi sebanyak 43.620 batang pala Makian dan telah disalurkan sebanyak 43.560 batang ke kelompok tani di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Sedangkan benih hasil produksi TA 2024 masih ada sebanyak 8.667 batang pala Ternate 1 masih dalam tahap pemeliharaan dan belum disertifikasi.

Tabel 14 Daftar penyaluran benih sisa TA 2023

No	Kelompok Tani	Alamat	Komoditi	TA	Jumlah (batang)
1	Pribumi Mandiri	Ds. Wayamiga, Kec. Bacan Timur	Pala Makian	2023	2.860

2	Usaha Mandiri	Ds. Towokuna, Kec. Bacan Selatan	Pala Makian	2023	2.420
3	Foturu	Ds. Toin, Kec. Botang Lomang	Pala Makian	2023	2.310
4	Suka Maju	Ds. Kubung, Kec. Bacan Selatan	Pala Makian	2023	2.090
5	Tabangame Maju	Ds. Tabangame, Kec. Bacan Timur	Pala Makian	2023	2.860
6	Pintu Kota	Ds. Labuha, Kec. Bacan	Pala Makian	2023	1.650
7	Maju Bersama	Ds. Sumae, Kec. Bacan Timur	Pala Makian	2023	2.200
8	Hate Gosora	Ds. Babang, Kec. Bacan Timur	Pala Makian	2023	2.310
9	Inohorimoi	Ds. Bibinoi, Kec. Bacan Timur	Pala Makian	2023	2.750
10	Lemo Lemo Jaya	Ds. Lemo Lemo Kec. Gane Barat	Pala Makian	2023	1.870
11	Sejatra Tomori	Ds. Tomori, Kec. Bacan	Pala Makian	2023	1.100
12	Tani 03	Ds. Tawa, Kec. Kasiruta Timur	Pala Makian	2023	3.300
13	Palamea Indah	Ds. Palamea, Kec. Kasiruta Barat	Pala Makian	2023	2.750
14	Tanjung Liboba	Ds. Liboba Hijra, Kec. Joronga	Pala Makian	2023	2.200
15	Sininga Moi	Ds. Bahu, Kec. Mandjioli Selatan	Pala Makian	2023	2.750
16	Luja II	Ds. Sayoang, Kec. Bacan Timur	Pala Makian	2023	3.080
17	Jaya Mandiri	Ds. Babang, Kec. Bacan Timur	Pala Makian	2023	3.300

18	Ahakolano	Ds. Marabose, Kec. Bacan	Pala Makian	2023	1.760
	Total				**43.560**

c. Nurseri Konvensional Ternate

Benih yang diproduksi di Nurseri Konvensional Ternate tahun 2025 yaitu komoditas pala Ternate 1 sebanyak 20.000 batang. Benih Pala Ternate 1 diambil dari Blok Penghasil Tinggi milik Salim Anto di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Sampai dengan bulan Desember 2025 ini hanya 14.117 benih pala yang tumbuh baik. Hal ini mungkin dikarenakan benih dibeli dalam bentuk biji, dan dikecambahkan sendiri di nurseri sehingga tingkat pertumbuhan atau daya berkecambah rendah. Sedangkan untuk tahun sebelumnya, benih pala dibeli dalam bentuk kecambah sehingga tingkat pertumbuhan lebih baik.

Sisa benih pala dari TA 2024 ada 11.425 batang telah lulus sertifikasi dan telah disalurkan ke Kelompok tani di wilayah Kota Ternate, sebagai berikut :

Tabel 13 Daftar penyaluran benih sisa TA 2024:

No.	Nama Kelompok Tani	Kelurahan	Kecamatan	TA	Jumlah (batang)
1	Masigaro Laha	Gambesi	Ternate Selatan	2024	1.000
2	Kalumata Jaya	Kalumata	Ternate Selatan	2024	1.000
3	Makuwaje	Tabona	Ternate Selatan	2024	1.000
4	Mosonyinga	Bula	Ternate Barat	2024	1.000
5	Madaha	Sulamadaha	Ternate Barat	2024	1.000
6	Bahari	Kalumpang	Ternate Tengah	2024	1.000
7	Kastela Bersatu	Kastela	Pulau Ternate	2024	895
8	Faudu II	Faudu	Pulau Hiri	2024	910
9	Dorari Isa II	Dorari Isa	Pulau Hiri	2024	910
10	Tanjung Fila	Faudu	Pulau Hiri	2024	900

11	Masigaro Laha	Loto	Ternate Barat	2024	900
12	Soa Loloa	Moti Kota	Pulau Moti	2024	910
	Total				**11.425**

d. Nurseri Konvensional Tidore

Benih yang diproduksi di Nurseri Konvensional Tidore tahun 2025 yaitu komoditas pala Ternate 1 sebanyak 20.000 batang. Benih Pala Ternate 1 diambil dari Blok Penghasil Tinggi milik Salim Anto di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Sampai dengan bulan Desember 2025 benih pala yang tumbuh ada 11.540 batang, kendala yang sama seperti yang ada di nurseri Ternate, yaitu benih dibeli dalam bentuk biji, dan dikecambahkan sendiri di nurseri sehingga tingkat pertumbuhan atau daya berkecambah rendah. Sedangkan untuk tahun sebelumnya, benih pala dibeli dalam bentuk kecambah sehingga tingkat pertumbuhan lebih baik.

Untuk benih pengadaan tahun 2024 yang disalurkan di tahun 2025 sebanyak 14.050 batang pala varietas Ternate 1. Benih TA 2024 yang telah disertifikasi ini telah disalurkan ke kelompok tani di Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 16 Daftar penyaluran benih sisa TA 2024:

No.	Nama Kelompok Tani	Kelurahan	Kecamatan	TA	Jumlah (batang)
1	Sri Maju	Koli	Oba	2024	2.000
2	Kilo 8/PayaheWeda	Payahe	Oba	2024	1.500
3	Usaha Bersama	Akelamo	Oba Tengah	2024	2.400
4	Karangetan	Galala	Oba Utara	2024	2.300
5	Kate-Kate	Tuguiha	Tidore Selatan	2024	1.010
6	Koa Madiyahi	Koa Madiyahi	Tidore Timur	2024	2.440

7	Tomagoba Mandiri	Tomagoba Mandiri	Tidore	2024	1.000
8	Talaga Buku Maitara	Talaga Buku Maitara	Tidore Utara	2024	1.400
	Total				**14.050**

e. Bimbingan Teknis Nurseri 2025

Dalam rangka mengakselerasi penyediaan benih unggul tanaman perkebunan khususnya untuk perkebunan rakyat, maka pemerintah melaksanakan dengan membangun logistik benih di kawasan pengembangan perkebunan, sehingga mudah dan menghemat biaya distribusi. Penyediaan benih bermutu oleh pemerintah salah satunya diwujudkan melalui pembangunan Nurseri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarananya serta pembangunan kebun sumber benih di sejumlah kawasan pengembangan komoditas tanaman perkebunan.

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, BBPPTP Ambon memiliki tugas dalam pengawasan mutu benih, pembinaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perbenihan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Bimbingan Teknis Nursery menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa tenaga nursery memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar. Bimbingan Teknis Nurseri telah dilaksanakan pada tanggal 26 – 27 September 2025 bertempat di Hotel Amaris Ambon.

Bimbingan teknis nursery ini diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1) Memberikan pemahaman tentang kebijakan dan regulasi nursery perkebunan.

2) Membekali peserta dengan keterampilan pengendalian OPT pada pala dan cengkih.
3) Menumbuhkan kemampuan manajerial dan administrasi nursery.
4) Mendorong penerapan Standar Layanan Minimum (SLM) nursery.

Melalui kegiatan Bimtek ini, peserta diharapkan:

1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang nursery.
2) Memahami standar dan regulasi yang berlaku.
3) Mampu mengimplementasikan pengelolaan nursery sesuai standar teknis dan standar layanan minimum.

Materi yang diberikan dalam Bimbingan Teknis Nurseri ini antara lain: Kebijakan dan Regulasi Nursery Perkebunan, Pengendalian OPT Pala dan Cengkih, Standar Layanan Minimum Nursery serta dilaksanakan diskusi terbuka antara keempat nurseri. Selain diberikan materi – materi tersebut juga telah dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Kepala BBPPTP Ambon dan semua pihak (SDM) yang menangani keempat nurseri. Isi dari komitmen bersama yang telah ditandatangani antara lain:

1) Menjaga dan memastikan jumlah produksi benih mencapai target untuk tahun 2025 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang.
2) Mengupayakan tingkat kematian benih tidak melebihi 20%, dengan menerapkan teknik budidaya, pemeliharaan, dan pengendalian yang tepat sesuai standar yang telah ditetapkan.
3) Melaksanakan pengelolaan benih secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan mutu, kesehatan benih, dan keberlanjutan lingkungan.

4) Menerapkan hasil pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan Bimbingan Teknis Nursery 2025 dalam kegiatan perbenihan di masing-masing nursery.
5) Tenaga nursery diharapkan dapat berinovasi dalam pengelolaan nursery untuk menjaga produktivitas benih.
6) Menciptakan komunikasi yang efektif serta membangun kerjasama yang harmonis baik di lingkungan internal nursery maupun dengan pihak eksternal, khususnya antar nursery dan instansi pusat, guna mendukung tercapainya target dan peningkatan mutu benih secara berkelanjutan
7) Siap untuk dilakukan monitoring dan evaluasi oleh instansi terkait guna memastikan tercapainya target produksi dan mutu benih.

f. Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan Produksi Benih di Nurseri

Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh nurseri antara lain:

1) Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan banyaknya benih yang busuk dan mati.
2) Hama dan penyakit juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan benih.
3) Keterlambatan penyediaan benih akibat cuaca, yaitu curah hujan yang tinggi sehingga buah pala tidak sampai fase masak fisiologis sudah mengalami gugur muda yang terjadi di semua wilayah Maluku.
4) Rumah Benih 4 di Nurseri Ternate diapit oleh Bangunan Kantor dan juga pohon milik tetangga, sehingga tanaman kurang mendapatkan cahaya sinar matahari.
5) Mesin air dan beberapa instalasi penyiraman di Nurseri Ternate mengalami kerusakan sedangkan anggaran untuk pemeliharaan tidak ada.

2. Capaian Kinerja Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan

Pengembangan Kawasan merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan sektor pertanian. Tahun 2025 menjadi periode penting dalam konsolidasi program seiring dengan adanya penyesuaian kebijakan, refocusing anggaran, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Sasaran kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman ABT Tahun 2025 meliputi Perluasan Tanaman pala, Peremajaan kakao, Kegiatan dilaksanakan pada beberapa wilayah/kabupaten sesuai dengan potensi dan kesiapan daerah. Pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan merupakan program Direktorat Jenderal Perkebunan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman Perkebunan dengan sasaran masyarakat penerima bantuan pemerintah. Dasar Pelaksanaan kegiatan adalah sebaga berikut :

a) Surat Tugas dari Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor B-1166/PI.400/E/09/2025 tanggal 11 September Tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Kawasan Perkebunan di Lokasi Provinsi, Kabupaten, Kota berdasarkan wilayah kerja masing-masing;

b) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BBPPTP Ambon Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-018.05.2.567717/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Pengembangan/perluasan kawasan tanaman pala dilaksanakan dengan target luasan 4.300 hektar yang tersebar di provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Penetapan lokasi tersebut didasarkan pada potensi pengembangan komoditas pala, kesiapan lahan, serta dukungan kelembagaan petani di masing-masing wilayah, guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan kawasan tanaman palakegiatan peremajaan tanaman kakao dilaksanakan di dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup 2 (dua) kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup 3 (tiga) kabupaten. Kegiatan pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan

yang dilakukan oleh BBPPTP Ambon meliputi dua kegiatan utama yaitu pengembangan kawasan Pala dan pengembangan kawasan Kakao, dengan rincian sebagai berikut :

1) Pengembangan Kawasan Tanaman Pala;
2) Peremajaan Tanaman Kakao.

Pada Tahun 2025 telah ditetapkan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Pala perluasan dengan target seluas 4.300 hektar, dan dan peremajaan kakao seluas 2.000 hektar dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 147 Rincian Kegiatan Pengembangan Kawasan Pala, kakao

No	Rincian Kegiatan	Luas Target (Ha)	Bantuan Diserahkan	
			Benih Siap Tanam (Batang)	Pupuk Organik (kg)
051	Perluasan Tanaman pala			
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab. Maluku Tengah	550	66.000	176.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab. Halmahera Tengah	400	48.000	128.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab. Halmahera Utara	300	36.000	96.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab. Halmahera Selatan	400	48.000	128.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab.Kepulauan Sula	400	48.000	128.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab.Halmahera Timur	100	120.000	32.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab.Halmahera Barat	100	120.000	32.000

	▪ Perluasan tanaman pala di Kab. Pulau Morotai	300	36.000	96.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab. Pulau Taliabu	450	54.000	144.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kota Ternate Sula	200	24.000	64.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kota Tidore kepulauan	300	36.000	96.000
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab.Fak-Fak	200	24.000	-
	▪ Perluasan tanaman pala di Kab. Kaimana	600	72.000	-
	Total	4.300	732.000	1.120.000
052	Peremajaan Tanaman Kakao			
	▪ Peremajaan Tanaman Kakao di Kab. Poso	400	400.000	
	▪ Peremajaan Tanaman Kakao di Kab. Morowali Utara	300	300.000	
	▪ Peremajaan Tanaman Kakao di Kab. Parigi Moutong	300	300.000	
	▪ Peremajaan Tanaman Kakao di Kab. Kolaka Timur	300	300.000	
	▪ Peremajaan Tanaman Kakao di Kab. Kolaka Utara	300	300.000	
	▪ Peremajaan Tanaman Kakao di Kab. Konawe Selatan	200	200.000	
	▪ Peremajaan Tanaman Kakao di Kab. Bombana	200	200.000	
	Total	2.000	2.000.000	



Gambar 7 Salur bantuan kegiatan pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan a) salur benih pala di Kabupaten Halmahera Barat; b) salur benih Pala di Kabupaten; c) salun benih pala di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 8 Salur bantuan kegiatan pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan a) salur benih pala di Kabupaten Halmahera Barat; b) salur benih Pala di Kabupaten; c) salun benih pala di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Pala Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 22.078.000.000, telah direalisasikan sebesar Rp. 21.145.834.817, atau sebesar 95,78%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik. Realisasi tersebut mendukung terlaksananya kegiatan pengembangan kawasan pala

secara efektif serta berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Tabel 18 Realisasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Sisa Anggaran	Justifikasi
Pengawalan, Pendampingan dan Monitoring Evaluasi Pengembangan Kawasan Tebu (BPPTP Ambon)	1.976.900.000	650.859.094	32,92%	1.326.040.906	Realisasi CPCL baru mencapai 3,4 ribu dari target 15 ribu ha akibat ketidaksesuaian jadwal tanam di Kab. Malang dan penolakan bongkar ratoon pada tanaman produktif. Perubahan strategi ke perluasan yang baru ditetapkan Desember juga terkendala karena masa tanam tebu telah berakhir pada November.
Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Perluasan Pala	22.078.000.000	21.145.834.817	95,78%	932.165.183	Sejumlah dinas belum menuntaskan usulan dan SPJ biaya perjalanan dinas hingga akhir periode kegiatan
Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan Peremajaan Tanaman Kakao	23.740.000.000	23.321.030.001	98,24%	418.969.999	Realisasi monev terkendala jadwal yang berbenturan dengan penutupan tahun anggaran. Parigi Moutong & Morowali Utara blm ada penyaluran benih, sehingga blm ada perjalanan

					pendampingan & monev.
Total	**47.794.900.000**	**45.117.723.912**	**94,40%**	**2.677.176.088**	

3. Capaian Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma. Peremajaan Tanaman Kelapa.

Kegiatan peremajaan tanaman kelapa tahun 2025, dilaksanakan di kabupaten Mappi dan Kabupaten Merauke provinsi Papua Selatan, masing-masing seluas 100 ha. Jenis bantuan yang diterima oleh petani yakni tanaman kelapa sebanyak 22.000 batang dan pupuk sebanyak 66.000 kg.

4. Capaian Akselerasi Hilirisasi Komoditas Tebu Kabupaten Malang

Kegiatan akselerasi hilirisasi tebu di Kabupaten Malang merupakan mandat strategis untuk mendukung target nasional swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan gula industri pada tahun 2030. Program ini difokuskan pada manajemen *bongkar ratoon* guna mengatasi masalah rendahnya rendemen akibat penggunaan tanaman keprasan yang berulang-ulang. BBPPTP Ambon bertugas mengawal penyediaan benih unggul serta perlindungan tanaman agar tepat sasaran dan tepat mutu.

Hingga saat ini, realisasi kegiatan *bongkar ratoon* di Kabupaten Malang telah mencapai poin-poin signifikan sebagai berikut:

Tabel 19 Status Realisasi per Kategori CPCL Tebu Kab. Malang

Kategori CPCL	Tahapan SK	Luas Lahan (Ha)	Distribusi Benih (Mata)	Status Realisasi
Definitif (Tahap 1-3)	Tahap 1 - 3	1.452,51	87.150.600	Benih & HOK sudah tersalurkan 100%
Usulan/Indikatif (Tahap 4-15)	Tahap 4 - 15	3.560,94	213.655.800	Proses verifikasi dan validasi potensi lahan

Total Akumulasi	**15 Tahap**	**5.013,45**	**300.806.400**	**Progres menuju target POK**
Catatan : Target total bongkar ratoon Kabupaten Malang adalah 15.000 ha.				

a. Target Luasan : Total target yang ditetapkan untuk Kabupaten Malang adalah 15.000 ha.

b. SK CPCL Definitif (Tahap 1-3) : Telah terselesaikan verifikasi dan penyaluran untuk lahan seluas **1.452,51 ha**. Dari luasan tersebut, distribusi benih mencapai **87.150.600 mata** yang telah diterima 100% oleh petani, bersamaan dengan Biaya Hari Orang Kerja (HOK).

c. Progres Usulan Indikatif (Tahap 4-15) : Saat ini terdapat usulan tambahan seluas **3.560,94 ha** dengan kebutuhan benih mencapai **213.655.800** mata yang sedang dalam tahap verifikasi.

d. Potensi Keberlanjutan : Lahan seluas 1.452,51 ha yang dikategorikan sebagai Kebun Benih Datar (KBD) ini diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan benih untuk Kebun Tebu Giling (KTG) seluas **14.525,10 ha** di masa mendatang.



Gambar 9 Monitoring bantuan dan penyaluran benih tebu

Tim BBPPTP Ambon telah melakukan pengawalan teknis melalui koordinasi dengan Dinas TPHP Kabupaten Malang, Pabrik Gula (PG) Kebonagung, PG. Krebet Baru, penyuluh, hingga Babinsa. Beberapa temuan penting meliputi:

a. Klasterisasi Lahan : Lahan dikelompokkan menjadi tiga klaster utama, yaitu Klaster Karst : (Gedangan, Bantur, Pagak, Donomulyo, sebagian Kalipare), Klaster Non-Karst : (Kromengan, Tumpang, Jabung, sebagian Kalipare), dan Klaster Lahan Kering **:** (Karangploso).

b. Resistensi Petani : Ditemukan tantangan di lapangan berupa penolakan dari sebagian kelompok tani untuk melakukan bongkar ratoon meskipun lahan sudah dikepras lebih dari 4 kali. Petani beranggapan produktivitas masih cukup menguntungkan untuk digiling, padahal secara teknis vigor tanaman mulai menurun dan rentan terhadap akumulasi penyakit.

c. Kriteria Teknis : Sesuai Kepmentan No. 318/2015, penggantian ratoon diwajibkan bagi lahan yang telah dikepras lebih dari 3 kali untuk memutus siklus hama dan menjaga rendemen.

Berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah perbaikan untuk periode mendatang adalah:

a. Percepatan Pendataan, Mengusulkan pendataan CPCL dimulai lebih awal pada Triwulan III (Juli) agar sesuai dengan jendela tanam varietas unggul seperti Bululawang (BL) pada bulan September-November.

b. Sinergi Kehutanan: Pendataan CPCL untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Kelompok Tani Hutan (KTH) disarankan mulai pada April (Triwulan II) karena adanya prosedur Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang membutuhkan waktu lebih lama.

c. Optimalisasi Kesesuaian Lahan: Disarankan melibatkan akademisi untuk memperbaiki faktor pembatas lahan (seperti drainase dan hara) agar kelas kesesuaian lahan dapat naik dari S3 (Sesuai Marginal) menjadi S2 (Cukup Sesuai).

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPPTP Ambon sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Sasaran terjaminnya mutu benih tanaman perkebunan dan terwujudnya layanan pelindungan tanaman perkebunan dapat dicapai sesuai target, dengan capaian layanan pelindungan tanaman mencapai 100 % pada seluruh komoditas, capaian layanan perbenihan mencapai 80% sesuai target serta Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,18 (skala Likert 1–4) menunjukkan kualitas pelayanan publik yang baik.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran BBPPTP Ambon Tahun 2025 mencapai 96,56 persen dari total pagu anggaran, yang mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk peningkatan kinerja dan kualitas layanan BBPPTP Ambon pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja

Lampiran II. Indikator Kinerja Utama